



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2021 -2026**



**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

Penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Perubahan ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja atau Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pencapaian sasaran dan program dalam 5 (lima) tahun kedepan. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah ini sangat mutlak diperlukan, sehingga tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di masa yang akan datang pada khususnya.

Kuala Tungkal, Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
**SETDA**  
H. H. AGUS SANUSI, M.S.I  
PENYERTA UTAMA MADYA  
NIP. 680817 199203 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	6
2.2 Sumber daya Sekretariat Daerah .....	19
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah .....	31
<b>BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI SETDA</b>	
3.1 Indikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan setda .....	34
3.2 Teladan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	37
3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi .....	55
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	61
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .....	62
<b>BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Setda .....	64
<b>BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	67
<b>BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	84
<b>BAB. VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	97
<b>BAB. VIII. PENUTUP</b> .....	100

## DAFTAR TABEL

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Setda Kab. Tanjab Barat.....	18
Tabel I. T.C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat.....	20
Tabel II. T.C 24 Review Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat 2016 – 2026 .....	23
Tabel III. Matrix Penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat.....	42
Tabel IV. Matrix Penjabaran Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tanjab Barat .....	56
Tabel V. Komparasi sasaran Renstra Setda Kab. Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran Renstra Setda Provinsi Jambi dan Renstra dan Renstra Kementerian Dalam Negeri .....	56
Tabel VII. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 .....	64
Tabel X. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan .....	85
Tabel XI. Indikator Kinerja Utama penyelenggaraan bidang urusan.....	98

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. Renstra PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah)
4. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)
5. Renja PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah)

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5(lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

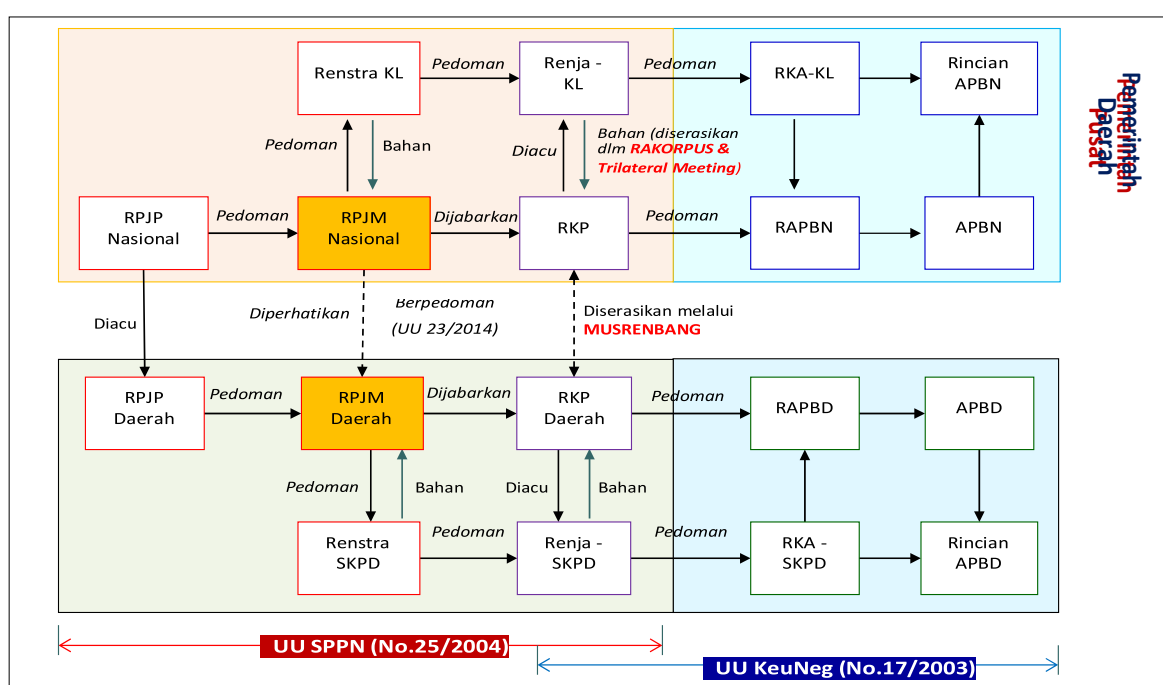
Renstra PD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun,
- bagaimana mencapainya dan,
- Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.

Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabiupaten di Provinsi Sumatera Tengah;
- Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 8 tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang perubahan Nomenklatur SKPD Penanggungjawab RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021 pada Perda Kab. Tanjab Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kab. Tanjab Barat Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Bupati Tanjung jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 33).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- Peningkatan Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf untuk mewujudkan visi dn misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah disepakati dalam Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Target Sasaran Pembangunan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah selaku unsur staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta para pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan selaku unsur staf di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;



3. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renja, RKT dengan Renstra.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

##### **BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI SEKRETARIAT DAERAH**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya..

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

## **BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
3. Pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sekretaris Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Tata Pemerintahan**

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum daerah, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Kerja Sama**

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri, fasilitasi kerjasama luar negeri, serta monitoring dan evaluasi kerja sama;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerjasama; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Asisten Perekonomian Dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **Bagian Perekonomian**

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



### **Bagian Pengadaan Barang/Jasa**

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Sumber Daya Alam**

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protocol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, serta perencanaan dan keuangan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan serta rumah tangga; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan lingkup sekretariat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Bagian Peencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan; dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Staf Ahli**

1. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
2. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Staf Ahli, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

### **A. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten.

Asisten terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum. Masing-masing asisten membawahi bagian, sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
- 1) Bagian Tata Pemerintahan, mencakup :
    - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan.
    - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan.
    - c) Sub Bagian Otonomi Daerah.
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
    - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual.
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
    - c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
  - 3) Bagian Hukum, mencakup :
    - a) Sub Bagian Perundang-undangan.
    - b) Sub Bagian Bantuan Hukum,
    - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
  - 4) Bagian Kerja Sama, mencakup :
    - a) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri,
    - b) Sub Bagian Fasilitas Kerjasama Luar Negeri,
    - c) Sub Bagian Evaluasi Kerjasama.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan pembangunan, yang membawahi :
- 1) Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program.
    - b) Sub Bagian Pengendalian Program.
    - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2) Bagian Sumber Daya Alam, mencakup :
    - a) Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
    - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
    - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam Energi dan Air.
  - 3) Bagian Perekonomian, mencakup :
    - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD.
    - b) Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
    - c) Sub Bagian Pemcaanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.

- 4) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, mencakup :
  - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
  - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum membantu Sekretaris Daerah di bidang administrasi dan umum yang membawahi :

- 1) Bagian Organisasi, mencakup :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan.
  - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
  - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Bagian Umum, mencakup :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian.
  - b) Sub Bagian Perlengkapan.
  - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
- 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mencakup :
  - a) Sub Bagian Protokol.
  - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
  - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
- 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan, mencakup :
  - a) Sub Bagian Perencanaan.
  - b) Sub Bagian Keuangan.
  - c) Sub Bagian Pelaporan

3. Staf Ahli

Staf Ahli Bupati mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya kepada Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





## **2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki SDM yang cukup beragam. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki pegawai sebanyak 271 orang, yang terdiri dari 140 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 243 Orang Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kerja Kontrak, Tenaga Harian Lepas (TKS, TKK, THL),

Jumlah pegawai eselon II sebanyak 7 pegawai, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, serta 3 Staf Ahli. Eselon III dan IV masing - masing sebanyak 36 yaitu para kepala bagian orang dan 12 orang, kepala subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari seluruh jumlah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat PNS, TKS, TKK dan THL yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 9 orang, yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 94 orang, yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 6 orang, yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 168 orang, yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 10 orang dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 5 orang.

## **2.2 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2016- 2021 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021-2026 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya disajikan pada tabel **T.C. 23** dan **T.C. 24** berikut :

**TABEL. TC.23**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-					REALISASI CAPAIN TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Skor penilaian LPPD Kab. Tanjab Barat				60%	3.2985	3.3305	3<ST≤4 ST	3<ST≤4 ST	-	60%	27,439	3<ST≤4 ST	3<ST≤4 ST	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Persentase batas wilayah Kabupaten yang diselesaikan				0	100%	100%	80%	100%	-	80%	100%	80%	80%	0.00%	80.00%	- 100.00%	100.00%	80.00%
3	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pertriwulan				10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	100%	100%	10 Bulan	10 Bulan	10 bulan	80%	50%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	50.00%
4	Persentase Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan				-	-	-	-	75%	-	-	-	-	45.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.44%
5	Persentase Keselarasan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Setda terhadap RPJMD				100%	100%	100%	80%	85%	95%	90%	100%	75%	45.04%	95.00%	90.00%	100.00%	93.75%	52.99%
6	Persentase respon positif kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	-	100%	95%	95%	-	-	100%	80%	75%	0.00%	0.00%	100.00%	84.21%	78.95%
7	Cakupan Pengendalian terhadap Inflasi				4±1%	4±1%	3,5±1%	3,5±1%	3±1%	4±1%	4±1%	3,5±1%	3,5±1%	3,5±1%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

8	Persentase Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah				20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tepat Waktu				100%	100%	100%	90%	90%	70%	75%	75%	90%	34%	70.00%	75.00%	75.00%	100.00%	37.78%
10	Persentase Produk Hukum Daerah yang tidak saling bertentangan						100%	90%	90%	-	-	100%	80%	45%	0.00%	0.00%	100.00%	88.89%	50.00%
11	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkup Setda terpenuhi					12Bulan	12Bulan	65%	70%		12Bulan	12 Bulan	65%	34%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48.57%
12	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Jabatan terpenuhi					3 Rmh Dinas 100%	3 Rmh Dinas 100%	80%	85%		3 Rmh Dinas 100%	3 Rmh Dinas 100%	80%	80%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.12%
13	Indeks Keupasan Layanan Tamu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah				100%	100%	100%	78%	100%	100%	100%	100%	78%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
14	Jumlah Investor (PMA/PMDN) yang melakukan investasi di Kab. Tanjab barat = 37 investasi di akhir tahun							100%			-	-	-	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
15	Tingkat pengangguran terbuka							75%				-		70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.33%
16	Kepatuhan dan kerjasama kemitraan antara perusahaan dengan lembaga/ asosiasi petani pada 5 komoditi unggulan							80%				-		75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.75%
17	Persentase Permasalahan Kasus Lahan yang diselesaikan				100%	100%	100%	60%	60%	100%	100%	100%	60%	25%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	41.67%

18	Peringkat Capaian Prestasi MTQ Tingkat Provinsi				3 Besar	4 Besar	4 Besar	4 Besar	4 Besar	3 Besar	4 Besar	4 Besar	3 Besar	3 Besar	133.33%	100.00%	100.00%	133.33%	133.33%
19	Indeks Kepuasan Masyarakat				74.50%	74.50%	74.50%	75%	75%	70%	70%	70%	75%	74%	93.96%	93.96%	93.96%	100.00%	98.67%
20	Persentase OPD Kabupaten tepat Ukuran, tepat Fungsi				65%	75%	85%	95%	100%	60%	65%	80%	85%	50%	92.31%	86.67%	94.12%	89.47%	50.00%

**TABEL. TC.24**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantor	475,422,800	382,625,000	752,615,896	707,045,302	5,770,826,579		335,400,200	681,307,670	652,031,900	4,697,704,996		87,66%	90,53%	92,22%	81,40%	2,022,133,894	1,591,611,192
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				78,000,000					75,682,000					97,03%	19,500,000	18,920,500
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3,064,743,700					2,284,239,353					74,53%	766,185,925	571,059,838
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	328,225,000	382,625,000	332,170,000	265,970,000	247,767,900	335,400,200	296,360,000	241,790,000	176,490,000		87,66%	89,22%	90,91%	71,23%	389,189,475	262,510,050
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				718,100,000				709,047,600						98,74%	179,525,000	177,261,900
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	55,453,200		172,086,836	172,055,978	170,671,197		166,497,170	166,151,800	165,980			96,75%	96,57%	97,25%	142,566,803	83,203,738
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	11,778,200					11,778,200					100%				2,944,550	2,944,550
	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				39,538,250					36,615,500					92,61%	9,884,563	9,153,875
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	73,744,600		248,359,060	269,019,324	268,832,602		218,450,500	244,090,100	257,110,800			87,96%	90,73%	95,64%	214,988,897	179,912,850
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman				1,160,508,000					997,082,700					85,92%	290,127,000	249,270,675
	10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				3,319,958,800					2,548,125,414					76,75%	829,989,700	637,031,354
	11	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah				63,870,000					61,185,000					95,8%	15,967,500	15,296,250
	12	Penyediaan Jasa Administrasi Staf Ahli, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				279,005,000					265,636,079					95,21%	69,751,250	66,409,020
	13	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan/Dinas				42,001,373					39,293,390					93,55%	10,500,343	9,823,348
	14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Jabatan/Dinas				46,481,654					45,621,375					98,13%	11,620,414	11,405,344

2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>3,398,960,000</b>	<b>7,605,387,500</b>	<b>6,706,954,520</b>	<b>7,147,361,000</b>	<b>628,222,400</b>		<b>7,550,774,016</b>	<b>6,247,596,476</b>	<b>6,454,289,218</b>	<b>5,179,894,321</b>		<b>99,28%</b>	<b>93,15%</b>	<b>90,30%</b>	<b>82,45%</b>	<b>6,371,721,355</b>	<b>6,358,138,508</b>
	1	Pembangunan Gedung Kantor	74,900,000	791,800,000		1,587,000,000	310,750,000		1,148,003,000		1,618,400,000	309,119,000		144,99%		101,98%	99,48%	691,112,500	768,880,500
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	475,900,000	838,600,000	1,270,642,500	823,600,000	1,429,758,100		1,538,203,125	1,634,858,750	1,243,405,100			183,43%	128,66%	150,97%	92,37%	1,209,625,150	1,104,116,744
	3	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	36,500,000	617,337,500	430,400,000	445,000,000	294,625,000		574,506,875	578,823,640	393,734,000	286,597,044		93,06%	134,49%	88,48%	97,28%	455,965,625	458,415,390
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas					389,000,000					332,030,000					85,35%	97,250,000	83,007,500
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	296,400,000	483,600,000	728,640,000	751,000,000	686,600,000		411,012,038	608,918,351	687,606,350	671,366,723		84,99%	83,57%	91,56%	97,87%	736,560,000	594,725,866
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	363,200,000	2,021,660,000	2,216,449,808	2,266,711,000	2,221,311,000		1,238,467,101	1,528,380,690	1,422,553,388	1,438,446,389		61,26%	68,96%	62,76%	64,76%	2,272,332,952	1,406,961,892
	7	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas					288,050,000					190,505,140					66,14%	72,012,500	47,626,285
	8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	1,531,760,000	668,450,000	785,548,085	618,650,000	370,624,900		509,313,227	558,367,045	438,586,780	340,091,175		76,19%	71,08%	70,89%	91,76%	993,758,246	461,589,557
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	244,700,000	801,840,000	1,275,274,127	655,400,000	292,105,000		774,956,500	1,338,248,000	650,003,600	291,026,750		96,65%	104,94%	99,18%	99,63%	817,329,782	763,558,713
3		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>450,825,000</b>		<b>386,466,000</b>	<b>36,830,000</b>	<b>277,878,000</b>		<b>105,792,000</b>	<b>299,834,000</b>	<b>331,160,500</b>	<b>257,037,000</b>			<b>77,58%</b>	<b>91,78%</b>	<b>92,50%</b>	<b>287,999,750</b>	<b>248,455,875</b>
	1	Peningkatan Manajemen barang milik Daerah	341,300,000		103,466,000	49,750,000			105,792,000	85,725,000	43,882,500				82,85%	88,21%		123,629,000	58,849,875
	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	109,525,000		283,000,000	311,080,000	277,878,500			214,109,000	287,278,000	257,037,000			75,66%	92,35%	92,50%	245,370,875	189,606,000
4		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah</b>					<b>360,850,000</b>					<b>327,136,000</b>					<b>90,66%</b>	<b>90,212,500</b>	<b>81,784,000</b>
	1	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negri					360,850,000					327,136,000					90,66%	90,212,500	81,784,000
5		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Produser</b>					<b>73,936,000</b>					<b>59,119,000</b>					<b>79,96%</b>	<b>18,484,000</b>	<b>14,779,750</b>
	1	peningkatan Disiplin Pegawai					35,820,000					22,675,000					63,30%	8,955,000	5,668,750

	2	Pengelolaan administrasi kepegawaian					38,116,000					36,444,000					95,61%	9,529,000	9,111,000			
6		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>																-	-			
	1	Rapat kerja cama	35,915,300					22,190,800									61.79%	8,978,825	5,547,700			
	2	Pembinaan Aparatur kecamatan, pemilihan camat teladan tingkat Kab. Tanjung Jabung Barat dan Rapat Koordinasi Camat	271,331,000	324,201,625	240,625,000	130,950,000	192,137,000	226,392,500	296,404,325	211,800,000	107,725,000						83.44%	91.43%	88.02%	82.26%	289,811,156	210,580,456
7		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya</b>					<b>6,550,000</b>					<b>6,550,000</b>						<b>100%</b>	<b>1,637,500</b>	<b>1,637,500</b>		
	1	Pegembangan SDM					6,550,000					6,550,000						100%	1,637,500	1,637,500		
8		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>					<b>48,184,000</b>					<b>44,016,000</b>							12,046,000	11,004,000		
	1	Penyusunan Renstra, IKU, Renja, dan Tapkin Setda Kab. Tanjung Barat					39,021,500					35,508,500						91%	9,755,375	8,877,125		
	2	penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi setda tanjab barat					9,162,500					8,507,500						100%	2,290,625	2,126,875		
9		<b>program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																	-	-		
	1	Penyusunan laporan dan pengendalian keuangan sekretariat daerah					44,232,500					44,232,475						100%	11,058,125	11,058,119		
10		<b>Program Opimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>2,776,328,000</b>	<b>2,530,016,000</b>	<b>2,671,418,250</b>	<b>3,325,490,000</b>	<b>3,320,685,000</b>	<b>2,750,321,995</b>	<b>2,527,265,706</b>	<b>2,665,291,500</b>	<b>3,312,473,700</b>	<b>3,320,685,000</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,655,984,313</b>	<b>3,644,009,475</b>			
	1	Penyedia alat tulis kantor	23,881,000					21,617,750					91%									
	2	Peningkatan mutu dan Program siaran RSPD Tanjung Jabung Barat	235,125,000					223,310,048					95%									
	3	peningkatan SDM, Mutu siaran Tungkal Televisi	291,048,000					280,518,891					96%									
	4	Media cetak dan Elektronik	409,990,000					409,531,406					100%									
	5	Informasi Publikasi	1,604,464,000					1,604,300,650					100%									
	6	Data dan Dokumentasi	211,820,000					211,043,250					100%									



11		<b>Program Layanan Komunikasi Pimpinan</b>		4,006,594,000	3,237,388,250			4,006,150,750	3,231,388,250				100%	100%				
12		<b>Program Dokumentasi dan Informasi</b>		1,144,940,000	462,731,800			1,142,632,456	462,605,000				100%	100%				
	1	Kegiatan Layanan Komunikasi Pimpinan				524,180,000	796,730,000			523,180,000	796,730,000				100%	100%	330,227,500	329,977,500
	2	Kegiatan peningkatan kerjasama langganan informasi				151,826,000	223,370,000			151,820,000	223,370,000				100%	100%	93,799,000	93,797,500
	3	Kegiatan peningkatan dan publikasi informasi				3,089,964,000	3,134,420,000			3,089,964,000	3,134,420,000				100%	100%	1,556,096,000	1,556,096,000
	4	Kegiatan Dokumentasi dan Informasi				34,860,000	46,650,000			34,810,000	46,650,000				100%	100%	20,377,500	20,365,000
	5	Kegiatan peningkatan kemitraan media				101,390,000	141,390,000			101,140,000	141,390,000				100%	100%	60,695,000	60,632,500
	6	Kegiatan Operasional keprotokolan				94,460,000	51,560,000			82,749,750	51,560,000				100%	100%	36,505,000	33,577,438
13		<b>Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan proses pengawasan</b>															-	-
	1	Kerjasama Antar Daerah		100,620,000	150,650,000	84,450,000	58,150,000	57,235,814	140,150,000	77,450,000			56.88%	93.03%	91.71%		98,467,500	68,708,954
14		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>															-	-
	1	Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan Usaha BUMD	79,947,500	307,878,500	118,171,000	40,260,000	76,703,200	276,637,900	112,571,000	40,260,000	96%	90%	95%	100%		136,564,250	126,543,025	
15		<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH</b>															295,016,258	231,653,011
	1	Penerimaan KUNKER Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah/ Non Departemen/Luar Negeri				135,000,000				67.97%						33,750,000	-	
	2	Kunker/inspeksi KDH/WKDH				135,000,000				91,762,998						33,750,000	22,940,750	
	3	Koordinasi dengan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				1,045,065,031				834,849,045				79.88%		261,266,258	208,712,261	
26		<b>Program Pengembangan wilayah Perbatasan</b>															-	-
	1	Rencana Penata dan Penegasan batas daerah kabupaten	214,010,000	271,763,750	280,560,000	192,020,000	174,070,000	175,353,470	182,999,250	243,433,000	61,530,000	81.94%	67.34%	86.77%	32.04%	283,105,938	165,828,930	
	2	Pembinaan dan pemabkuan nama rupa bumi unsur buatan dalam kab. Tanjab Barat	153,700,000	148,650,000	99,540,000	31,042,400	24,362,400	136,878,900	105,017,083	96,290,000	21,437,400	89.06%	70.65%	96.73%	69.06%	114,323,700	89,905,846	

27		<b>Program peningkatan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>																-	-
	1	Peningkatan Manajemen barang milik Daerah				46,000,000						38,165,000				82.97%	11,500,000		-
18		<b>Program Perlindungan dan Konservasi SDA</b>	<b>438,950,450</b>	<b>943,435,800</b>	<b>649,193,000</b>	<b>637,343,500</b>	<b>755,000,000</b>	<b>391,730,280</b>	<b>668,270,319</b>	<b>571,373,500</b>	<b>241,737,000</b>	<b>216,137,000</b>	<b>89,24%</b>	<b>70,83%</b>	<b>88,01%</b>	<b>33,63%</b>	<b>28,63%</b>	855,980,688	522,312,025
	1	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Perikanan	119,800,450	126,450,000	79,114,500	83,114,500	100,000,000	101,942,300	93,302,100	69,464,500	31,415,000	31,960,000	85,09%	73,79%	87,80%	37,80%	31,96%	127,119,863	82,020,975
	2	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	146,500,000	91,131,000	91,131,000	110,000,000	110,000,000		102,432,709	77,531,000	32,828,000	33,877,000		69,92%	85,08%	96,33%	30,80%	137,190,500	61,667,177
	3	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Perternakan	105,700,000	202,043,000	83,272,500	130,275,000	150,000,000	96,853,700	142,935,641	73,172,500	39,239,500	44,064,500	91,63%	70,75%	87,87%	30,12%	29,38%	167,822,625	99,066,460
	5	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup	98,100,000	171,500,000	107,115,500	136,115,500	145,000,000	88,277,400	107,991,831	89,365,500	41,416,000	36,366,000	89,99%	62,97%	83,43%	30,43%	97,98%	164,457,750	90,854,183
	6	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Bidang Sumber Daya Air		69,899,800	66,557,500	66,557,500	100,000,000		29,837,100	61,057,500	24,497,500	24,497,500		42,69%	91,74%	36,81%	99,29%	75,753,700	34,972,400
	7	Kegiatan pengadministrasikan sumber daya alam			137,850,000					124,630,000					90,41%			34,462,500	31,157,500
19		<b>Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>				<b>241,050,000</b>	<b>154,852,000</b>				<b>210,435,950</b>	<b>114,300,000</b>				<b>73,81%</b>	<b>73,81%</b>	98,975,500	81,183,988
	1	Kegiatan Maintenance Perangkat LPSE				75,000,000	75,000,000				56,760,000	64,100,000				75,68%	85,47%	37,500,000	30,215,000
	2	Kegiatan Sekretariat LPSE				166,050,000	79,852,000				153,675,950	77,600,000				92,55%	97,18%	61,475,500	57,818,988
20		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>				<b>2,041,775,000</b>	<b>860,087,000</b>				<b>1,820,980,800</b>	<b>625,857,500</b>				89,19%	72,77%	725,465,500	611,709,575
	1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				77,600,000	67,190,000				36,500,000	42,115,000				47,04%	62,68%	36,197,500	19,653,750
	2	Unit layanan Pengadaan				1,814,275,000	862,497,000				1,664,100,000	725,575,000				91,72%	84,12%	669,193,000	597,418,750
	3	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Anggota Kelompok Kerja/Pokja ULP Kab. Tanjab barat				149,900,000	30,400,000				120,380,800					89,31%		45,075,000	30,095,200

21		<b>Program Ketahanan Ekonomi</b>		<b>458,664,000</b>	<b>59,359,200</b>	<b>134,052,500</b>	<b>114,350,000</b>		<b>408,451,700</b>	<b>535,442,000</b>	<b>120,568,000</b>	<b>111,910,000</b>						191,606,425	294,092,925
	1	Koordinasi Program Peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab Barat		198,928,500	132,133,500	40,821,000	34,500,000		179,960,700	106,933,500	35,048,500	32,660,000		90%	81%	86%	95%	101,595,750	88,650,675
	2	Penyaluran dan pengembalian Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		76,578,500	71,284,500	21,663,000	19,250,000		69,373,500	68,134,500	20,625,000	19,250,000		91%	96%	95%	100%	47,194,000	44,345,750
	3	Pengawasan dan Pengendalian inflasi Daerah		105,678,500	193,110,000	40,385,000	33,500,000		93,722,000	174,560,000	35,607,500	33,500,000		89%	90%	88%	100%	93,168,375	84,347,375
	4	penyaluran Raskin		77,478,500	78,130,500				65,395,500	76,430,500				84%	98%			38,902,250	35,456,500
	5	Pengawasan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi			118,933,500	31,183,500	27,100,000			109,383,500	29,286,000	26,500,000			92%	94%	98%	44,304,250	41,292,375
22		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>																-	-
	1	Pembinaan Hukum di Daerah																-	-
	2	Kodifikasi perda dan Pelayanan Umum																-	-
	3	Ranham																-	-
23		<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>																-	-
	1	Jumlah produk hukum yang disebarluaskan	133,475,000	177,570,000	167,247,120	148,125,000	144,275,000	129,393,500	175,089,000	167,124,120	144,565,000	144,275,000	97%	98,60%	99,90%	97,60%		192,673,030	190,111,655
	2	Jumlah Ranperda dan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan	230,475,000	279,085,000	251,371,600	45,031,000	50,466,000	221,825,000	274,572,141	251,071,600	43,831,000	50,466,000	96,25%	98,38%	99,88%	97,34%		214,107,150	210,441,435
	3	Penanganan Perkara Hukum	208,225,000	320,100,000	283,991,200	235,735,070	235,735,070	205,463,330	311,806,200	283,660,000	202,205,000	175,735,000	99%	95,88%	99,88%	98,28%		320,946,585	294,717,383
	4	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi perundang-undangan		91,605,000	97,301,200	174,700,000			86,890,000	97,301,200	174,700,000			96,36%	100%	100%		90,901,550	89,722,800

	5	Jumlah Laporan Investarisasi data kegiatan RANHAM	88,875,000	183,070,000	237,698,180	95,810,000	136,315,000	88,754,000	178,851,000	237,408,180	95,810,000	136,315,000	97,70%	97,70%	99,88%	100%		185,442,045	184,284,545
24		<b>Program peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi</b>																-	-
	1	Kegiatan Kerjasama antar daerah					104,971,000					104,601,800					99,64%	26,242,750	26,150,450
26		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>																-	-
	1	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah/pemerintah daerah dan dengan perguruan tinggi					56,488,200					56,355,904					99,76%	14,122,050	14,088,976
27		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	1,422,900,000	5,521,948,000	3,822,442,000	680,948,000	426,264,000	1,285,314,140	2,664,645,798	2,173,834,500	473,331,500	356,162,000	90%	48%	57%	70%	84%	2,968,625,500	1,738,321,985
	1	Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan	253,369,000		101,235,000	52,335,000	82,495,000	185,595,000		211,485,000	51,555,000	64,158,000	73%		209%	99%	78%	122,358,500	128,198,250
	2	Pembinaan dan koordinasi perencanaan pembangunan Kab. Tanjab Barat		144,935,000	146,565,000	64,665,000	63,776,000		124,370,761	133,315,000	59,302,000	45,051,000		86%	91%	92%	71%	104,985,250	90,509,690
	3	Penyusunan Renstra, IKU, Renja, dan Tapkin Setda Kab. Tanjab Barat			111,020,000	39,220,000	39,021,500			106,370,000	38,503,000				96%	98%		47,315,375	36,218,250
	4	Penyusunan Buku Data Proyek Fisik Kab. Tanjab Barat			49,875,000	25,000,000	15,460,000			47,110,000	22,145,000	12,695,000			94%	89%	82%	22,583,750	20,487,500
	5	Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Kab. Tanjab Barat		161,100,000	101,988,000	46,238,000	54,458,000		110,762,900	95,138,000	39,750,000	45,583,000		69%	93%	86%	84%	90,946,000	72,808,475
	6	Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Anggota Kelompok Kerja/Pokja ULP Kab. Tanjab barat		79,970,000	65,650,000	74,950,000	63,125,657	38,061,000						79%	58%			70,923,914	9,515,250
	7	Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi (LAKIP) Setda Kab. Tanjab Barat		56,000,000	35,840,000	13,540,000			24,975,000	30,806,000	11,740,000			45%	86%	87%		26,345,000	16,880,250
	8	Penyusunan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			144,800,000	77,600,000				105,276,500					73%			55,600,000	26,319,125
	9	Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kab. Tanjung Jabung Barat				50,300,000	43,475,000				46,250,000	38,350,000						23,443,750	21,150,000

10	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pembangunan		300,518,000	219,970,000	171,170,000	166,600,000		304,833,398	176,132,000	154,426,500	150,325,000		101%	80%	90%	90%	214,564,500	196,429,225
11	Kegiatan Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan serta pelatihan penyusun LPPK		187,100,000	55,555,000	65,930,000			117,075,000		49,660,000			63%		75%		77,146,250	41,683,750
12	Kegiatan pelaksanaan Outcome Pelaksanaan Pembangunan Kab. Tanjab Barat		128,490,000	101,999,000				108,887,200	89,299,900				85%	88%			57,622,250	49,546,775
13	Peningkatan disiplin pegawai			158,445,000	58,035,000				147,380,000	57,100,000				93%	98%		54,120,000	51,120,000
14	Evaluasi SOP				37,900,000	30,100,000				31,817,500	29,525,000				84%	100%	17,000,000	15,335,625
15	Peningkatan Pelayanan Publik	178,750,000	147,575,000	83,740,000	101,425,000	65,675,000	177,388,450	141,753,350	80,857,000	98,255,000	64,490,000	99%	96%	97%	97%	98%	144,291,250	140,685,950
16	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	837,231,000	4,361,050,000	2,687,945,000			791,250,290	1,739,502,882	1,140,842,000			95%	40%	42%			1,971,556,500	917,898,793
20	Peningkatan Ketatalaksanaan		96,200,000	34,285,000	35,400,000	33,600,000		88,867,000	29,828,000	32,950,000	31,950,000		92%	87%	93%	100%	49,871,250	45,898,750
21	Penyusunan laporan standar pelayanan minimal					22,100,000											5,525,000	-
23	kegiatan Bintek SOP			55,335,000					42,175,000					78%			13,833,750	10,543,750
24	Kegiatan Penyusunan SPM	38,125,000	44,825,000	72,600,000	21,200,000		35,325,000	36,495,300	69,945,000	18,750,000		93%	81%	96%	88%		44,187,500	40,128,825
25	Penyusunan Evaluasi Jabatan			93,400,000	23,100,000				92,475,000	21,830,000				99%	95%		29,125,000	28,576,250
27	<b>Program Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>																-	-
1	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	47,736,500					39,609,500					82.98%					11,934,125	9,902,375
28	<b>Program Keagamaan dan Masyarakat</b>																-	-
1	Peningkatan Syiar Nilai-nilai Keagamaan		438,816,500	406,070,200	524,423,000	204,288,000		197,521,600	315,823,721	377,289,100	55,415,000		45,01%	77,78%	71,94%	27,13%	393,399,425	236,512,355
2	Amaliyah Ramadhan dan Dua hari Raya	136,509,000	155,470,000	134,255,000	111,005,000	7,610,000	136,509,000	140,572,000	130,950,000	105,990,000	1,650,000	100%	90,42%	97,54%	95,48%	21,68%	136,212,250	128,917,750
3	Perangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji seta Pengiriman TKHD	209,889,000	348,445,000	397,060,000	334,510,000		209,889,000	247,389,000	236,195,000	310,830,304		100%	71%	59,49%	92,92%		322,476,000	251,075,826

4	Festival Anak Shaleh	381,285,018	459,268,200	295,856,744	369,235,000	14,770,000	381,285,018	288,741,200	261,076,708	346,072,600	14,070,000	100%	62,87%	88,24%	93,72%	95,26%	380,103,741	322,811,382
5	Training Centre (TC) MTQ	724,182,000	863,720,000	783,152,400	878,126,500	12,000,000	724,182,000	827,265,100	735,111,890	777,045,100	12,000,000	100%	95,78%	93,87%	88,49%	100%	815,295,225	768,901,023
6	Pembinaan Dai Pedesaan/Kelurahan	1,495,961,000	1,894,300,000	1,821,100,000	1,670,850,000	1,540,405,000	1,495,961,000	962,050,000	1,442,075,000	1,382,670,000	1,062,975,000	100%	50,79%	79,19%	82,84%	69,01%	2,105,654,000	1,586,432,750
7	Pembinaan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan	7,143,322,750	7,417,166,300	7,321,200,000	7,261,300,000	7,058,350,000	7,143,322,750	7,168,169,000	7,206,550,000	6,918,100,000	5,641,975,000	100%	96,64%	98,43%	95,27%	79,93%	9,050,334,763	8,519,529,188
8	Kafilah MTQ Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,165,423,500	1,399,975,300	1,545,127,276	1,633,795,000	17,500,000	1,165,423,500	1,296,524,670	1,447,676,276	1,471,206,300	17,500,000	100%	92,61%	93,69%	90,05%	100%	1,440,455,269	1,349,582,687
9	Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan Sekretariat Tim Pembinaan usaha Kesehatan Sekolah	149,844,000	184,280,000	135,992,600	57,868,000	40,368,000	149,844,000	162,465,999	1,269,880,000	51,536,000	27,925,000	100%	88,16%	93,38%	89,06%	69,18%	142,088,150	415,412,750
10	Pelayanan Terpadu sidang Isbat Nikah		268,866,000	266,037,500	333,141,000	211,471,000		238,250,600	2,461,120,000	287,049,000	205,296,000		88,61%	92,51%	86,16%	97,08%	269,878,875	797,928,900
11	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjung Jabung Barat	8,396,199,500	1,640,086,000	1,300,879,000	1,068,176,000	499,169,500	839,619,500	1,321,994,440	1,018,382,900	1,027,543,500	361,993,250	100%	80,61%	78,28%	96,20%	72,52%	3,226,127,500	1,142,383,398
12	Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten	559,174,000	687,939,000	632,828,875	6,558,156,500		559,174,000	621,986,800	571,479,500	638,670,500		100%	90,41%	90,31%	97,04%		2,109,524,594	597,827,700

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Lingkungan strategis yang berpengaruh terdiri dari Analisis lingkungan Internal (ALI) terhadap aspek kekuatan (*Strength*) dan aspek kelemahan (*Weakness*) dan analisis lingkungan Eksternal (ALE) terhadap aspek Peluang (*Opportunity*) dan aspek hambatan/ ancaman (*Threat*).

Beberapa faktor kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipandang dari sudut Analisis SWOT, dapat dikemukakan sebagai berikut :

### A. Faktor Internal

Faktor internal terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*), merupakan potensi yang terkandung dalam tubuh organisasi / satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara rinci faktor internal terdiri dari :

- 1) Kekuatan (*Strength*) ;
  - a. Adanya komitmen pimpinan dan staf yang cukup besar dalam pelaksanaan tupoksi;
  - b. Tersedianya sumber daya Manusia dalam jumlah yang cukup;
  - c. Adanya kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - d. Tersedianya sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup;
  - e. Kemampuan dan kemauan aparatur jajaran Sekretariat Daerah yang cukup tinggi untuk belajar.
- 2) Kelemahan (*Weakness*) ;
  - a. Motivasi kerja aparatur masih belum merata;
  - b. Data pendukung yang valid dan akurat kurang terinventarisir dengan baik;
  - c. Kemampuan dan keterampilan aparatur masih kurang dan belum merata;
  - d. Kurangnya kemauan untuk berkompetisi dalam pelaksanaan tugas;
  - e. Kurangnya koordinasi dalam mendukung mekanisme teamwork.

### B. Faktor Eksternal

Faktor eksternal terdiri dari Peluang (*Opportunity*) dan Hambatan / Ancaman (*Threat*), merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian sungguh – sungguh dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara rinci faktor eksternal terdiri dari :

- 1) Peluang (*Opportunity*) ;
  - a. Adanya peraturan perundang-undangan (UU, PP, Keppres, Kepmen) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Adanya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan;

- c. Adanya peran serta dan dukungan swasta dan masyarakat yang cukup tinggi;
  - d. Semakin kokoh dan meluasnya kebijakan otonomi daerah dan demokratisasi;
- 2) Hambatan / Ancaman (*Threat*);
- a. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
  - b. Belum optimal mekanisme perencanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - c. Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah secara fluktuatif dan cepat;
  - d. Kurangnya pemerataan kesempatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan aparatur.

Dari hasil identifikasi terhadap faktor lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, maka disimpulkan isu-isu strategis dalam unsur internal dan eksternal untuk menentukan strategi yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI SETDA**

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyesuaian visi, misi dan arah pembangunan daerah. Masalah pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu Tahun 2021-2026.

#### **3.1 Indikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas yang harus menjadi tujuan perbaikan, antara lain :

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal;
7. Belum adanya SDM perancang produk hukum daerah;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap Otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-egineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### 3.2 Telaahan Visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada lima tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD tahun 2005-2025). Di dalam RPJPD ditegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Tanjung Jabung Barat Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

#### 1. Visi

Dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode 2021 – 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005 – 2025 dan berdasarkan masalah – masalah utama yang sedang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 4 (empat) tahun sesuai misi yang diemban, diwujudkan dalam visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2024 :

**“MUNUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”**  
**(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)**

**Berkualitas**, Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

**Ekonomi maju**, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

**Religius**, berlandaskan nilai – nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

**Kompetitif**, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumber daya unggulan daerah.

**Aman**, suasana aman dan tertib sehingga masyarakatnya mandalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari – hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

**Harmonis**, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Penjelasan :

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak

Sumber daya manusia dianggap sebagai modal utama pembangunan daerah, perlu dibekali dengan iman, ilmu, dan berahlak, agar mampu menjadi manusia yang berdaya saing, sehat dan berahlak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sejahtera dan berkah.

Misi 2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis

Dengan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis menjadikan rasa nyaman pada masyarakat untuk beraktivitas, dan kondusif bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Selain itu kondisi harmonis tidak hanya sebatas antar umat beragama, kelompok, dan lapisan masyarakat tapi juga terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik

Menyelenggarakan roda pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan efektif, efisien, dan akutanbel agar menghasilkan pelayanan publik yang prima, kerja pemerintah yang berorientasi kinerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Misi4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Seiring perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk, tentunya harus diikuti dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Pengembangan cakupan aktivitas ekonomi lebih luas lagi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta pengangguran. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai upaya skala mikro yang sejalan dengan upaya peningkatan aktivitas perekonomian.

Misi 5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Pembangunan infrastruktur dan penguatan akses bagi seluruh desa dan kota, terutama bagi desa yang tertinggal, ditujukan agar desa – desa dan kota dapat tumbuh berkembang secara bersamaan dan seimbang.

**MATRIK PENJABARAN VISI BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN 2021-2024**

**“TANJAB BARAT BERKAH”**

Tanjung Jabung Barat yang **“Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis”**

NO.	VISI	INDIKATOR	Sasaran RPJMD	RENSTRA
A.	BERKUALITAS			
1.	Peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia yang profesional, sehat, cerdas, dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat	1. IPM (indeks Pembangunan Manusia) 2. IPG (indeks pengembangan Gender) 3. IDG (indeks Pemberdayaan Gender) 4. Angka Kematian Ibu (AKI) 5. Angka Kematian Bayi (AKB) 6. Angka Kematian Balita (AKABA) 7. Persentase Drop Out Keluarga Berencana 8. Angka Kemiskinan 9. Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 10. Harapan Lama Sekolah (tahun)	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
B.	EKONOMI MAJU			
1.	Memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian yang berkualitas, diiringi dengan laju inflasi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Pengeluaran riil Perkapita (Rp.000) 3. Tingkat Pengangguran terbuka (%) 4. Pertumbuhan Ekspor (%/th) 5. Realisasi ekspor (%/th) 6. Realisasi PMA dan PMDN (Rp.Juta) 7. Peningkatan PDRB per Kapita (Rp Ribu) 8. Laju Inflasi (%) 9. Indeks Gini (ketimpangan ekonomi) 10. Persentase Peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (%) 11. Tingkat pemerataan perekonomian (%) 12. Tingkat keterpeliharaan kelestarian alam 13. Tingkat keterpeliharaan lingkungan hidup	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

C.	RELIGIUS			
	Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah sosial dan toleransi yang menjadi ruh dan pedoman bagi seluruh aktivitas masyarakat dan pemerintahan	1. Tingkat Buta Aksara Al Qur'an		✓
		2. Tingkat pemberdayaan pengelola rumah ibadah		✓
		3. Tingkat kerukunan inter umat beragama dan antar umat beragama		✓
		4. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan Aktivitas Keagamaan masyarakat		✓
		5. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan keagamaan aparatur		✓
D.	KOMPETITIF			
	Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di level regional dan nasional dengan strategi yang tepat <b>menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki</b> untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan	1. Tingkat pemberdayaan dan Pengembangan Sentra Ekonomi daerah		✓
		2. Tingkat nilai jual produk-produk UMKM		✓
		3. Tingkat pemberdayaan dan pengembangan industri kreatif		✓
		4. Tingkat Produksi hasil Sumber Daya Daerah		✓
		5. Tingkat ketersediaan infrastruktur sebagai daya dukung daya saing daerah		✓
E.	AMAN			
	Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan inprastruktur yang adil-ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif	1. Tingkat peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan		✓
		2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
		3. Tingkat penyelesaian konflik		
		4. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga iklim investasi		
F.	HARMONIS			
	Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman. Harmonisasi beragama, suku, budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama	1. Tingkat sinergisitas program pembangunan daerah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.		✓
		2. Tingkat sinergisitas antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah		
		3. Tingkat sinergisitas antar OPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan di Desa.		
		4. Tingkat Kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya.		
		5. Tingkat pengembangan dan pemberdayaan kearifan local		



**MATRIK PENJABARAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2021-2024**

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Budaya Religius</li> <li>Pengembangan Budaya Demokratis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aparatur Pemerintah</li> <li>Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perda yang merupakan inisiatif DPRD</li> <li>Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif</li> <li>Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi implementasi perda</li> <li>Tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD</li> <li>Penyelesaian sengketa</li> </ol>	Bag. Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</li> <li>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</li> <li>Fasilitasi Bantuan Hukum</li> </ol>
	Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Penegakan Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aparatur Pemerintah</li> <li>Masyarakat</li> <li>Kelompok Masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak adanya peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang bersifat diskriminatif.</li> <li>Program pencegahan pelanggaran hukum dalam masyarakat.</li> </ol>	<p>Evaluasi perda</p> <p>Sosialisasi, advokasi dan edukasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi,</p>		<p>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</p> <p>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</p>

					3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.	advokasi dan edukasi peraturan perundang-undangan		
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	a. Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program perekonomian dan pembangunan	2. Pengembangan Budaya Demokratis	- Aparatur Pemerintah - Masyarakat	- Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bagian ADP	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pengelolaan BUMD dan BUMDES Secara Profesional	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan Kelembagaan dan Pengelolaan BUMD dan BUMDES Secara Profesional	a. Aparatur b. Pemerintah BUMD c. BUMDES	a. Adanya manajemen yang baik dalam kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes. b. Adanya pembinaan manajemen pengelolaan yang baik pada BUMDes.  c. Adanya kerjasama antara BUMD dengan BUMDes.	Sistem fit dan proper test untuk pimpinan dan pengelola BUMD, pelatihan pengelola BUMDes  Kerjasama	Bag. Perekonomian  Bag. Kerjasama	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Optimalisasi pertambangan dan migas bagi kesejahteraan	Program perekonomian dan pembangunan	Optimalisasi pertambangan dan migas bagi	Masyarakat	1. Meningkatkan persentase hasil pertambangan dan migas bagi	Mengaktifkan lifting migas, pertemuan berkala dengan	Bag. Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi

	syarakat		kesejahteraan masyarakat		kesejahteraan masyarakat.	usaha pertambangan, pemanfaatan partisipasi interest, update data produksi dan lifting migas, TJSLP Migas		Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Pemberdayaan Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		PemberdayaanK operasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.OPD 2.Koperasi 3.UMKM	1.Bertumbuhnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2.Adanya inovatif dari OPD terkait dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Bantuan modal usaha, pelatihan manajemen, inovasi usaha, penguatan evaluasi dan pengawasan, peningkatan kerjasama,	Bag. Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
	Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas		Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas	1.OPD 2.Swasta	1.Adanya Inovasi OPD terkait dalam meningkatkan Investasi dan Ekspor Non-Migas.	Melakukan inovasi dalam substansi kegiatan peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas.	Bag Perekonomian	
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu Dan Berkhlik.	a. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	ogram pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1.Mengaktifkan Kegiatan Keagamaan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama Yang Baik dan Benar	1.Masyarakat 2.Aparatur Pemerintah	1. Meningkatnya Partisipasi aparatur dalam kegiatan keagamaan  2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pengamalan agamanya masing-masing	Pengajian, sholat berjamaah, bakti sosial, sosialisasi (aparatur)  Pengajian, sholat berjamaah, bakti social, sosialisasi (masyarakat)	Kesra,  Kesra,	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
			2. Peningkatan Kualitas, Penyebaran dan Kesejahteraan Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji.	1. Da'i/ Muballigh, 2. Imam Masjid, 3. Bilal dan 4. Guru Ngaji	1. Meningkatnya SDM Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji  2. Penyebaran Da'i/ Muballigh sesuai dengan kebutuhan wilayah  3. Meningkatnya Kesejahteraan Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji	Pelatihan, beasiswa, standar kualifikasi  Penambahan jumlah / sebaran da'l dst.  Meningkatkan besaran honorarium dai dst.	Kesra  Kesra  Kesra	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

			3. Peningkatan Mutu Pendidikan Agama.	1. Pendidikan Agama 2. Guru Agama jenjang SD dan SMP	1. Terlibatnya pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Agama  2. Meningkatkan kualitas SDM guru agama jenjang SD dan SMP	Mata pelajaran agama, muatan lokal agama  Pelatihan, beasiswa, standar kualifikasi	kesra  kesra	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4. Peningkatan Prosentase Subsidi Pengembangan Pendidikan Agama di Pesantren dan Madrasah	- Pesantren dan Madrasah	Terlibatnya pemerinah daerah dalam Peningkatan Prosentase Subsidi Pengembangan Pendidikan Agama di Pesantren dan Madrasah	Fasilitasi dan koordinasi	kesra,	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tenram, Tertib dan Demokratis	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan	-	-	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi penyelesaian konflik	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Optimalisasi Pertambangan dan Migas bagi Kesejahteraan Masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan	Optimalisasi Pertambangan dan Migas bagi Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi hasil Pertambangan dan Migas bagi kesejahteraan masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan

								Hidup
	Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan melakukan gerakan hijau		Perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dengan	OPD Masyarakat	Terlaksananya dan Koordinasi dalam melakukan perbaikan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Pemerataan Pengembangan Daerah dari Desa sampai ke Kota	Sinergisitas antara Daerah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada masyarakat		Sinergisitas antara daerah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada Masyarakat	OPD	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi dalam sinergisitas antara Daerah dan Pusat dalam Pelayanan Listrik kepada Masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi	Bagian SDA	Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.	Pengembangan Budaya Religius dan Demokratis	Program perekonomian dan pembangunan	-Pengembangan Budaya Religius -Pengembangan Budaya Demokratis	- Aparatur Pemerintah - Masyarakat	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bag. Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) Untuk Pelayanan Publik	1. Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah		1. Adanya ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	1. OPD 2. Aparatur OPD	1. Transparansi pada peraturan dan prosedur partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat.	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag. Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	2. Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Penempatan Aparatur		1. Adanya Profesional, Transparan dan Akuntabel Dalam Penempatan Aparatur	1. Aparatur Pemerintah	1. Penempatan aparatur sesuai dengan kebutuhan 2. Adanya system terbuka penempatan aparatur 3. Penempatan aparatur didasarkan pada tingkat perilaku/moral, pendidikan, masa kerja, kompetensi, Pendidikan dan pelatihan/diklat, kepangkatan.	Berpedoman pada anjab dan evjab	Bag Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang beriman, berakhlak mulia	Peningkatan Kualitas pendidikan masyarakat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan mutu Pendidikan Dasar, menengah dan perguruan Tinggi	1. Pendidikan Dasar dan tenaga kependidikan	Terlibatnya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan menengah dan perguruan tinggi	Koordinasi fasilitasi, dan kerjasama (beasiswa, pertukaran	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah

				pada pendidikan dasar 3.Pendidikan menengah 4.Perguruan Tinggi		pelajar)		
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan demokratis	Penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1.Aparatur pemerintah 2.Masyarakat 3.Kelompok masyarakat	Sinergitas program antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum	Rumah perlindungan saksi dan korban, sosialisasi pengutan psikolog, penguatan peran RT/lingkungan kerjasama, aksi bersama	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang baik ( <i>Good Governance</i> ) untuk pelayanan publik	Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional	Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDes secara profesional	1.Aparatur pemerintah 2.BUMD 3.BUMDes	Adanya kerjasama antara BUMD dan BUMDes	Kerjasama	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
<b>Misi 3</b>	Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat		Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat	1.OPD 2.Aparatur Pemerintah	Proses penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan ramah	Implementasi aplikasi pelayanan publik, penyederhanaan proses birokrasi peningkatan kompetensi, briefing secara rutin	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama daerah
4.Pemerataan pembangunan	Pemenuhan kebutuhan		Pemenuhan kebutuhan	1.OPD terkait	Adanya inovasi dan strategi OPD terkait dalam	Koordinasi dan fasilitasi ke K/L	Bagian Kerjasama	Fasilitasi kerjasama



Daerah dari Desa sampai kota	telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower		telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower		pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower	alternatif akses telekomunikasi ke desa.		daerah
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) Untuk Pelayanan Publik	a. Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Governmant</i> )		1.Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Governmant</i> )	1.OPD 2.Aparatur OPD	1. Terbentuk dan tersedianya system  2. Tersedianya Perangkat  3. SDM Aparatur	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Kominfo Bag. PBJ  Bagian Umum/Perlengkapan Setda  Bagian Umum/Kepegawian Setda	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	b. Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Governmant</i> )		Peningkatan Efisiensi, Efektif dan Ramah dalam Melayani Masyarakat.	1.OPD 2.Aparatur pemerintah	1.Rumah dinas Bupati sebagai rumah rakyat, rumah singgah, tempat dialog	Penyediaan ruang singgah, ruang dialog, dan makan minum pertemuan	Penyediaan ruang singgah, ruang dialog, dan makan minum pertemuan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Administrasi

								Umum Perangkat Daerah
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Lapangan Usaha, Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja		Peningkatan Lapangan Usaha, Ekonomi Kreatif dan Kesempatan Kerja	1.OPD 2.Masyarakat	Integrasi rumah dinas dengan promosi produk industri rumah tangga	Integrasi rumah dinas dengan promosi produk industri rumah tangga	Bag Umum/ Rumah Tangga,	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>AKSI Program</b>	<b>PENJABARAN PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUBSTANSI</b>	<b>OPD</b>	<b>AKSI Substansi</b>
1.Mewujudkan kondisi Sosial yang tentram, tertib dan Demokratis	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Trantibmas melalui Pemberdayaan Masyarakat	-Aparatur Pemerintahan -Kelompok Masyarakat -Masyarakat Umumnya	-Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan	-Aktifnya siskamling dan Petugas Linmas	Bagian Tapem	Pengelolaan Administrasi
2.Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	Melakukan Upaya penyelesaian Tapal Batas	Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	-Melakukan upaya Penyelesaian Tapal Batas	-OPD -Masyarakat	-Adanya Strategi baru dalam upaya penyelesaian Tapal Batas  -Adanya Partisipasi Masyarakat dalam upaya penyelesaian Tapal Batas	-Pembentukan Tim Percepatan penyelesaian Tapal Batas, Meningkatkan koordinasi  -Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat	Bagian Tapem	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

MISI	PROGRAM	AKSI Program	PENJABARAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	SUBSTANSI	OPD	AKSI Substansi
		Program perekonomian dan pembangunan			1.Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	Optimalisasi dan tata kelola informasi publik	Bag.PBJ	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) Untuk Pelayanan Publik	a. Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )		1.Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Pemerintahan ( <i>E-Government</i> )	1.OPD 2.Aparatur OPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuk dan tersedianya sistem</li> <li>2. Tersedianya Perangkat</li> <li>3. SDM Aparatur</li> <li>4. Kesiapan jaringan,</li> <li>5. Efisiensi pengelolaan,</li> <li>6. Layanan online,</li> <li>7. Portal daerah,</li> <li>8. Government CIO (chief information officer)</li> <li>9. romosi e-government,</li> <li>10. E-participation,</li> <li>11. Open government,</li> <li>12. Cyber Security</li> <li>13. Tercipta Kepercayaan</li> <li>14. Adanya reliabilitas</li> <li>15.Dukungan kepada masyarakat yang perlu diakomodir dalam kebijakan e- government</li> </ol>	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

	b. Ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah		- Adanya ruang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pembangunan Daerah	- OPD - Aparatur OPD	1. Tingkat keterbukaan pada proses perencanaan pembangunan daerah. 2. Transparansi pada peraturan dan prosedur partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang mudah dipahami oleh masyarakat. 3. Transparansi melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan daerah.	Implementasi sistem tata kelola pemerintahan <i>E-Government</i>	Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
							Bag.PBJ	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

### **3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Menjadikan rumah dinas Bupati sebagai rumah rakyat
2. Mengaktifkan kegiatan keagamaan, meningkatkan sarana prasarana ibadah serta meningkatkan kulaitas, penyebaran dan kesejahteraan da'i imam masjid, bilal dan guru ngaji sehingga terbangunnya budaya religius
3. Memberikan biaya siswa pendidikan bagi mahasiswa S1, S2, dan S3
4. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, listrik, tower, air bersih dan kawasan potensial yang sulit dijangkau pembangunan serta hilirisasi industri.
5. Pemeberdayaan dan pemberian modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berbasisi rumah ibadah dan kelompok keagamaan.
6. Melakukan gerakan masyarakat sadar stunting (gemasting), peningkatan biaya operasional pukesmas untuk pelayanan masyarakat kurang mampu, serta penyediaan ambulance air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Membentuk dan mendorong milenia enterpreuner movement (Memo) agar warga Tanjung Jabung Barat memiliki mental berwiraswasta yang inovatif dan bersaing di era industri 4.0
8. Membuat cetak sawah, pembelian bibit dan pupuk secara berkala dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat desa menuju swasembada
9. Optimalisasi balai pelatihan kerja dalam menjawab kebutuhan kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Meningkatkan kinerja birokrasi, membentuk lembaga pengaduan masyarakat dalam rangka percepatan penyelesaian konflik lahan di Kabuapten Tanjung Jabung Barat

### **4. Tujuan Pembangunan Daerah**

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan.

Pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.

7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi

Berdasarkan Misi dan Tujuan pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Sekretariat Daerah Mengacu Kepada Misi Ke 4 : *"Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik"*.

### 3.3 Telaah Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Visi Provinsi Jambi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 yaitu **JAMBI MANTAP**, yakni :

***"TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, AMAN, NYAMAN, TERTIB, AMANAH DAN PROFESIONAL DIBAWAH RIDHO ALLAH SWT"***

Adapun Misi tersebut terdiri dari :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif bersih dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.
2. Memantapkan kualitas infrastruktur Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan local untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan pengelolaan komoditas unggulan, Pembinaan dan pengelolaan sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan berbasis agribisnis dan agroindustri guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Memantapkan perekonomian daerah, pengelolaan ekonomi dan pariwisata daerah yang maju, terkendali melalui pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim .
5. Memantapkan kualitas sumber daya manusia, yang berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, social budaya dan kesetaraan gender .

Tabel. V

**Komparasi Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
terhadap Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jambi dan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Sasaran pada Renstra Provinsi Jambi	Sasaran pada Kementerian Dalam Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah dokumen perencanaan Setda	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang akuntabel berkualitas.	Meningkatnya pelayanan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
2	Frekuensi pengelolaan keuangan Setda dan Pimpinan			
3	Pengelolaan keuangan Setda dan pimpinan			
4	Terlaksananya Penyusunan laporan akuntabilitas daerah kinerja instansi Setda dan penyusunan laporan pengendalian keuangan Setda			
5	persentase koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya, kunker/inspeksi KDH/WKDH			
6	Aset tercatat dengan akurat			
7	Persentase fasilitasi pakaian dinas aparatur sipil negara	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		
8	Persentase fasilitasi koordinasi kegiatan dalam dan luar daerah (kegiatan administrasi kepegawaian, kegiatan disiplin pegawai ,kegiatan jasa administrasi staf ahli )			
9	Persentase belanja kursus nasional dan sosialisasi serta bimtek bagi aparat pemerintah			
10	Persentase layanan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan rumah dinas			
11	Persentase fasilitasi peralatan rumah dinas/jabatan			
12	Persentase pemenuhan kebutuhan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas			
13	Persentase pendistribusian dan pengelolaan surat masuk dan keluar Setda			





34	Jumlah laporan administrasi pemerintahan daerah dan Jumlah pelaksanaan event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan dan daerah	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah		
35	Jumlah tanda batas kabupaten, kecamatan, Jumlah laporan			
36	Peringkat capaian Prestasi Camat teladan/Berprestasi tingkat kabupaten			
37	Kecamatan dengan indeks kepuasan masyarakat kategori baik dan jumlah kelurahan yang menerima dana kelurahan			
38	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah dan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan, Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jamaah Haji, Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan di Masyarakat, Menurunnya Angka Pasangan yang tidak memiliki Dokumen Pernikahan.		
39	Jumlah Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji serta Pengiriman TKHD			
40	Jumlah Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Provinsi			
41	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Dua Hari Raya Di 13 Kecamatan			
42	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan			
43	jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an			
44	Jumlah Penyelesaian Proses Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat di Dua kecamatan			
45	Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ			
46	Jumlah Dai Desa yang diberi pembinaan,	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Ilmu Keagamaan		Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
47	Jumlah guru ngaji yang diberi insentif pembinaan			
48	Jumlah Guru agama Imam Mudin dan guru Ngaji Ustad Pengajian Muallap/Pembinaan ilmu Agama			
49	Jumlah Pertemuan Forum Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah		

50	Keputusan bupati	Aparatur dan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah.	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama masyarakat yang agamis, bermoral, serta Harmonis	
51	Peraturan bupati			
52	Peraturan daerah			
53	Penyelesaian sengketa dan pelayanan terhadap aparaturnya dan masyarakat			
54	terciptanya aparaturnya dan masyarakat yang mengerti HAM			
55	Melaksanakan penyuluhan hukum terpadu			
56	Tertatanya produk hukum daerah yang tertib			
57	Penyusunan kerjasama dalam negeri, penyusunan dokumen MOU dan PKS kerjasama dalam negeri, terlaksana sosialisasi kerjasama dalam negeri dan rakor evaluasi pelaksanaan kerjasama kab. Tanjab barat	Terlaksananya Kerja Sama antar Daerah/Lembaga/Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Terwujudnya keselarasan kebijakan lintas sektoral bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
58	Terlaksananya sosialisasi potensi kerjasama tanjung jabung barat melalui forum kerja sama luar negeri dan tersedianya potensi kerjasama luar negeri			
59	Terlaksananya bahan pelaksanaan perumusan kebijakan evaluasi dalam dan luar negeri, terlaksananya evaluasi rakor evaluasi pelaksanaan kerjasama			
60	Jumlah monitoring, laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD Jumlah BUMD yang diberikan subsidi	Terselenggaranya koordinasi penataan kebijakan terkait bidang perekonomian dengan efektif dan efisien		
61	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Daerah dan Jumlah laporan TPID			
62	Jumlah monitoring pembinaan dan laporan KUPEM			
63	Jumlah monitoring dan laporan penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran			
64	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya efektifitas koordinasi/fasilitasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
65	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat			
66	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring			

	pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring			
67	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD dan pelaporan laporan tepra melalui sismontepra			
68	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Kelembagaan yang efektif		
69	Jumlah pemeliharaan Co. Location,			
70	Jumlah server yang dilakukan Pengecekan dan servis berkala			
71	Jumlah peserta sosialisasi Dan peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar			
72	Jumlah rapat-rapat koordinasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Meningkatnya efektifitas koordinasi/fasilitasi penyelenggaraan pembangunan, dan kerjasama daerah.	
73	Jumlah Laporan evaluasi			
74	Jumlah rapat-rapat koordinasi pertambangan dan lingkungan hidup			
75	Jumlah Laporan evaluasi			
76	Jumlah rapat-rapat koordinasi sumber energi dan air			
77	Jumlah Laporan evaluasi			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang kabupaten yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas. Adapun maksud dari penataan ruang kabupaten yaitu :

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di Daerah.

RTRWK berfungsi sebagai :

1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
7. acuan dalam administrasi pertanahan.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

1. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. penataan ruang kawasan strategis kota.

Strategi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah meliputi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
2. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di Daerah;
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;
5. Penatagunaan tanah.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kebijakan struktur ruang kabupaten terdiri atas:

1. Terwujudnya rencana tata ruang Wilayah yang berkualitas, serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan;
2. Terwujudnya rencana pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Memberi kepastian hukum dalam hal pemanfaatan ruang;
4. Memberikan rangsangan partisipasi masyarakat (Investor) untuk melaksanakan Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
5. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
6. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

### **3.5. Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu- isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan lptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
7. meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan sarana prasarana yang optimal
5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat
6. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026

1.	Visi	Misi ke- 3	Tujuan	
	Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah* (Berdaya saing, Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)	Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik	1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab
			2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah

No	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET					SUMBER DATA	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kualitas tatakelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta bertanggungjawab	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
			Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN UMUM
			Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN UMUM
		1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	32	35	40	43	43	BAGIAN ORGANISASI
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,66	80,66	80,70	80,75	85	88,31	
			Nilai AKIP Kabupaten	>60,01	>60,01	>61,50	>62,50	>70,01	>70,50	



		1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PROTOKOLER
2.	Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama, berbudaya dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemerintah daerah	2.1. Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
			Skor LPPD	3<ST SAST	3<ST SAS T	3<STS AST	3<STS AST	3<STS AST	3<ST SAST	
		2.2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN KESRA
		2.3. Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN HUKUM
		2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN KERJASAMA
		2.5. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PEREKONOMIAN
		2.6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN ADP
			Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA
2.7. Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAGIAN SDA		

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan.

Seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2021 – 2026) sebagai berikut :

Tabel T.C. 26.

VISI: Strategi “TANJAB BARAT BERKAH 2024” Tanjung Jabung Barat yang “*Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis*”

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik ( Bagian Hukum)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel 3.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Aparatur dan masyarakat mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan Meningkatnya Penataan Produk Hukum Daerah	Persentase produk hukum daerah yang tidak saling bertentangan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Penyusunan kebijakan daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah seluruh produk hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Keputusan Bupati dan Keputusan Sekretaris Daerah, Jumlah Peraturan Bupati, Jumlah Peraturan Daerah.
							Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penyelesaian sengketa, Jumlah Laporan Aksi HAM
							Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum disebarluaskan dan Jumlah masyarakat yang mendapat Penyuluhan Hukum
Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik ( Bagian Perencanaan dan Keuangan)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan asset daerah	Meningkatan Kualitas Perencanaan Penatausahaan keuangan dan aset serta pelaporan yang	Persentase keselarasan perencanaan, keuangan dan pelaporan Setda	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Aset tercatat dengan akurat

	akuntabel berkualitas	terhadap RPJMD						
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan keuangan Setda dan pimpinan
<b>Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik ( Bagian ADP)</b>								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
3.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Program perekonomian dan Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah buku data pembangunan Kab. Tanjab Barat
								Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
							Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring
							Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah lppk dan rekap program OPD

								Jumlah pelaporan laporan tepra melalui sismonteptra
<b>Misi 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Bagian Perekonomian)</b>								
<b>Tujuan/Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>
4.1.1. Meningkatnya perekonomian kabupaten	Terkendalinya laju inflasi	Persentase inflasi daerah	Program perekonomian dan pembangunan	Cakupan pengendalian terhadap inflasi	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Cakupan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi perekonomian daerah
								Frekuensi pelaksanaan monitoring perkembangan perekonomian daerah
								Jumlah dokumen pelaporan TPID
								Jumlah dokumen pelaporan perkembangan harga sembako
							Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah monitoring pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran
								Jumlah laporan pupuk

								Jumlah monitoring pembinaan KUPEM
								Jumlah laporan KUPEM
<b>Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak ( Bagian Kesra)</b>								
<b>Tujuan/Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>
1.1 Membentuk Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan Dilandasi Iman dan Taqwa Serta Berakhlak Mulia	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Capaian Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Partisipasi Aparatur dan Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Fasilitasi Pengajian Keagamaan (ASN)
								Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pengajian Keagamaan (Masyarakat)
						Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana Ibadah dan Pendidikan Keagamaan	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, Rekomendasi, Monitoring dan Evaluasi terkait Permohonan Hibah Sarana/Prasarana Ibadah
								Jumlah Fasilitasi, Verifikasi, Rekomendasi, Monitoring dan Evaluasi terkait Permohonan Hibah Sarana/Prasarana Pendidikan Keagamaan

								Jumlah Fasilitas, Verifikasi, Rekomendasi, Monitoring dan Evaluasi terkait Permohonan Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Sosial
						Meningkatnya SDM Da'i/ Muballigh, Imam Masjid, Bilal dan Guru Ngaji		Jumlah Peserta Pelatihan Da'i Desa/Kelurahan
						Meningkatnya Kesejahteraan dan Penyebaran Da'i/ Muballigh sesuai dengan Kebutuhan Wilayah		Jumlah Pembinaan Da'i Pembina Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
						Meningkatnya Kesejahteraan Imam Masjid, Bilal, Guru Ngaji, Mudim, Guru Agama		Jumlah Guru Minggu yang diberikan Insentif Pembinaan
								Jumlah Guru Agama, Imam, Mudim dan Guru Ngaji, Bilal diberi Pembinaan
						Meningkatnya Kualitas Kesehatan Sekolah	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi serta Pertemuan Forum Tim Pembina UKS Tingkat Kabupaten

MISI 2 : Mewujudkan Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib Dan Demokratis.								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
2.1 Terwujudnya suasana kehidupan yang tenram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya Kualitas Qori-Qoriah	Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Peringkat Capaian Prestasi MTQ Tingkat Provinsi	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Aktifitas Keagamaan dalam Pemerintahan dan Masyarakat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan
								Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan
								Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi yang diikuti
								Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ
								Jumlah Pembinaan Pengembangan Tilawatil Qur'an yang dilaksanakan
						Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Keagamaan Aparatur		Jumlah Peserta Pelatihan Takmir Masjid
								Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Safari Subuh dan Jum'at



						Meningkatnya Nilai-Nilai Keagamaan di Masyarakat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Pelaksanaan Festival Anak Sholeh Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi
						Meningkatnya Pelayanan Terhadap Jamaah Haji		Jumlah Fasilitas Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji serta Pengiriman TKHD
						Meningkatnya Kerukunan Inter dan Antar Umat Beragama	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Fasilitas Koordinasi Terkait Kerukunan Umat Beragama
						Menurunnya Angka Pasangan yang tidak memiliki Dokumen Pernikahan		Jumlah Penyelesaian Proses Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat
						Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan Keagamaan Aparatur		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Amaliyah Ramadhan dan Dua Hari Raya di 13 Kecamatan

**MISI 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis (Bagian SDA)**

Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
2.1.1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam Setda yang	Persentase permasalahan kasus lahan yang	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase permasalahan kasus lahan yang	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya	Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi	1. Jumlah rapat di bidang Pertanian, Kehutanan,

masyarakat serta perlindungan masyarakat	kondusif	diselesaikan		diselesaikan	Alam	Pengendalian bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Perikanan dan Ketahanan Pangan 2. Jumlah permasalahan yang terfasilitasi 3. Jumlah pelaksanaan monitoring kegiatan di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
--	----------	--------------	--	--------------	------	--	--	---

**MISI 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan**

Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
4.1.3. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam Setda yang kondusif	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	1. Jumlah rapat koordinasi di bidang pertambangan dan lingkungan hidup 2. Jumlah pelaksanaan monitoring kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup

**MISI 5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai Kota**

Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
5.1.1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi	Terciptanya Pengendalian Sumber Daya Alam Setda yang kondusif	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase permasalahan kasus lahan yang diselesaikan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Fasilitasi, Koordinasi dan Pemantuan bidang Sumber Daya Air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi	1. Jumlah rapat koordinasi di bidang Energi dan Air

masyarakat						dan Energi	dan Air	2. Jumlah Pelaksanaan monitoring kegiatan di bidang Energi dan Air
<b>MISI 3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Bagian Organisasi)</b>								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
<p>Tujuan Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Efesien dan akuntabel</p> <p>Sasaran</p> <p>3.1.1 Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Pemerintah</p> <p>3.1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</p>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Kelembagaan Yang Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai AKIP Kabupaten</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> <li>- Nilai Kematangan Perangkat Daerah</li> </ul>	Program Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai AKIP Kabupaten</li> <li>- Indeks kepuasan masyarakat</li> <li>- Nilai Kematangan Perangkat Daerah</li> </ul>	Penataan Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Laporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</li> <li>- Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tatalaksana</li> <li>- Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisis Jabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</li> <li>- Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana</li> <li>- Pengelolaan kelembagaan dan analisis Jabatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah laporan pelaksanaan reformasi birokrasi</li> <li>- Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah/ LKJIP</li> <li>- Jumlah OPD yang dilakukan survey IKM</li> <li>- Jumlah Dokumen SOP</li> <li>- Jumlah Regulasi Kebijakan Ketatalaksanaan</li> <li>- Jumlah laporan inovasi daerah</li> <li>- Jumlah Regulasi Kelembagaan</li> <li>- Jumlah Dokumen Analis Jabatan dan Analisis Beban Kerja</li> <li>- Jumlah Dokumen standar Kompetensi Jabatan</li> <li>-</li> </ul>

<b>MISI 4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Bagian Kerjasama)</b>								
<b>Tujuan/Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>
4.1.1 Meningkatnya Perekonomian Kerakyatan	Fasilitasi Kerja Sama antar Daerah, Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Daerah, Lembaga/ Perseorangan Dalam Negeri	Program Kerja Sama Pembangunan Daerah	Persentase Terlaksananya kerja sama Pembangunan Daerah	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi kerja sama Daerah, Lembaga/ Perseorangan dalam Negeri	Sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi
		Terlaksananya fasilitasi kerja sama antar daerah, Lembaga/ perseorangan luar Negeri			Kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri	Terlaksananya Fasilitasi kerja sama daerah, lembaga / Perseorangan Luar Negeri	Penyusunan Dokumen	Terlaksananya Penyusunan Dokumen
		Terlaksananya monitoring evaluasi kerja sama daerah, Lembaga/ Perseorangan dalam negeri & Luar Negeri			Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan kerja sama	Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kerja sama daerah, Lembaga/ Perseorangan dalam Negeri & Luar Negeri	Monitoring Evaluasi	Terlaksananya Monitoring Evaluasi
<b>MISI 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik ( Bagian Umum)</b>								
<b>Tujuan/Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>
3.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan Serta Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan terpenuhi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga Pimpinan yang baik dan terpelihara Serta Peningkatan Pelayanan Administrasi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang Tersedia

				Perkantoran				
		Persentase Pemenuhan Fasilitas untuk Pelayanan Kantor dan administrasi surat menyurat serta Administrasi kepegawaian terlaksana			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai / ASN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia  Jumlah Fasilitas Koordinasi Kegiatan Staf Ahli  Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang Dijalankan Jumlah Waktu Fasilitas Makanan dan Minuman Staf Ahli
<b>MISI 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik ( Bagian Umum)</b>								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah peserta pendidikan/pelatihan yang di Fasilitas  Jumlah Waktu pendistribusian dan pengelola surat masuk dan surat keluar Setda  Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Air

								<p>Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Internet/ TV Berlangganan</p> <p>Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Listrik</p> <p>Jumlah Penyediaan Beban Tagihan Pemakaian Telepon</p> <p>Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan</p> <p>Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p>
							<p>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>	<p>Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p>
							<p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p>	<p>Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan/ Pembersih Kantor</p> <p>Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum</p>

								(Tenaga Kebersihan) Kantor
		Persentase Peningkatan Jamuan Tamu Pimpinan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor  Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor  Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK) yang tersedia  Jumlah peralatan rumah tangga yang Tersedia  Jumlah Bahan Logistik Kantor (Alat Listrik, Alat dan Bahan Pembersih/Kebersihan) Rumah Dinas/Jabatan yang Tersedia  Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor  Jumlah Waktu Ketersediaan

							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Makanan dan Minuman Rumah Dinas/Jabatan Jumlah barang cetakan (blangko atau formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang Tersedia
		Persentase Sarana dan Prasarana (Aset Setda) dalam Kondisi Baik			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan OPD	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara  Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan  Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia  Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ Rehabilitasi  Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi



Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Humas)								
Tujuan/Sasaran RPJMD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemerintah Daerah Yang Berkualitas dan Transparan	Peningkatan Kerjasama dan Layanan Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Media Massa dan Peningkatan Optimalisasi dan Efektivitas Pemberitaan Pimpinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Pelaksanaan Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolan
								Dokumen kegiatan keprotokolan
						Meningkatnya Pelaksanaan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Media jurnal/surat kabar/majalah yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah
								Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah
						Terlaksananya Dokumentasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital
								frekuensi sewa billboard

<b>Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik (Bagian Tapem)</b>								
<b>Tujuan/Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>
3.1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Skor Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab.Tanjung Jabung Barat	Skor Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab.Tanjab Barat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai/Skor LPPD Kabupaten/ Kota	Administrasi Tata Pemerintahan	Nilai/Skor LPPD Kabupaten	Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Laporan
<b>MISI 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis (Bagian PBJ)</b>								
<b>Tujuan/Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>
2.1 Terwujudnya suasana kehidupan yang tenteram, tertib dan rukun antar umat beragama, Lapisan Masyarakat dan Kelompok	Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan infrastruktur	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tepat waktu	Perekonomian dan Pembangunan	- Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tepat waktu - Upaya Penyediaan informasi APBD oleh Pemerintahan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang ditindak lanjuti	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan pengadaan Barang/ Jasa
<b>Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik Untuk Pelayan Publik (Bagian PBJ)</b>								
<b>Tujuan/Sasaran RPJMD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Infrastruktur	Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa tepat waktu	Perekonomian dan Pembangunan	- Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tepat waktu - Terbentuk dan tersedianya system pelayanan Pengadaan secara elektronik	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang ditindak lanjuti	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pemeliharaan Co.Location, jumlah server yang dilakukan pengecekan dan servis berkala

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Sekretariat Daerah sebagai indikator capaian.

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, terdapat indikator Kinerja yang harus diacu dalam Renstra Sekretariat Daerah, indikator Kinerja RPJMD tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya intensitas dan Kualitas pelayanan administrasi perkantoran lancar
2. Meningkatnya Kelengkapan dan Kualitas Pelayanan Birokrasi
3. Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur
4. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS
5. Terselenggaranya Penyebaran Informasi
6. Meningkatkan Koordinasi Pelestarian SDA dan Flora Fauna Endemik
7. Meningkatkan pengelolaan BUMD dan Peningkatan Investasi lainnya
8. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kabupaten (ruas batas)
9. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Kecamatan (ruas batas)
10. Terwujudnya tertib administrasi batas pemerintahan Desa/kelurahan (ruas batas)
11. Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
12. Peningkatan sistem pelaksanaan bantuan dan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang transparan
13. Meningkatnya pelayanan administrasi perencanaan pembangunan
14. Peningkatan Pelayanan PATEN di Kecamatan
15. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
16. Terbit dan terlaksananya sistem penyebar luasan informasi secara transparan
17. Peningkatan kualitas dan penyebar luasan produk hukum serta pendampingan hukum (Perda, PerBup, SK)

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel penyajian Tabel. IX dan Tabel **T.C. 27**.

**TABEL TC. 27**  
**Rencana Program,Kegiatan,Subkegiatan dan Pendanaan Setda Kab. Tanjung Barat**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Progam dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggungjawab	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	24,686,371,700	100%	32,839,734,722	100%	36,187,211,319	100%	37,733,200,509	100%	40,123,254,926	100%	42,674,205,818	100%	214,243,978,994	Perencanaan dan Keuangan		
		4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	61,100,000	100%	518,485,000	100%	666,476,000	100%	703,599,750	100%	726,689,463	100%	736,069,463	100%	3,412,419,676			
				Nilai AKIP Perangkat Daerah Setda	60,39 (B)	60,39 (B)	62,55 (B)	65,45 (B)	67,75 (B)	70,10 (BB)	71,20 (BB)	71,20 (BB)										
		4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bagian Setda yang diselaraskan	10 Dokumen	10 Dokumen	61,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	61,100,000
				Jumlah dokumen perencanaan setda yang disusun sesuai dengan aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	10 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	4 Dokumen	170,275,000	4 Dokumen	245,191,000	4 Dokumen	250,500,000	4 Dokumen	255,500,000	4 Dokumen	260,250,000	20 Dokumen	1,181,716,000				
		4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Dokumen RKA SKPD	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	95,750,000	1 Dokumen	105,325,000	1 Dokumen	110,591,250	1 Dokumen	110,877,963	1 Dokumen	110,877,963	5 Dokumen	533,422,176				
		4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	1 Dokumen	85,850,000	1 Dokumen	94,435,000	1 Dokumen	103,878,500	1 Dokumen	109,071,500	1 Dokumen	109,071,500	5 Dokumen	502,306,500				
		4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Renstra, Dokumen Laporan Pelaksanaan Renja, Dokumen Laporan IKU, Dokumen Laporan Rencana Aksi,	6 Dok	6 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	4 Laporan	92,960,000	4 Laporan	140,510,000	4 Laporan	150,250,000	4 Laporan	155,500,000	4 Laporan	160,125,000	20 Laporan	699,345,000				
		4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja SKPD, Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan LKPJ	3 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 Laporan	73,650,000	2 Laporan	81,015,000	2 Laporan	88,380,000	2 Laporan	95,740,000	2 Laporan	95,745,000	8 Laporan	434,530,000				
		4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen keuangan tersusun berkualitas dan tepat waktu	100%	100%	17,777,838,700	100%	23,411,937,272	100%	26,465,661,839	100%	27,851,157,431	100%	29,313,077,802	100%	30,860,124,928	100%	155,679,797,972			
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	16,732,533,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	16,732,533,700			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Org/bln	-	131 Org/Bln	22,072,522,272	132 Org/Bln	24,819,911,839	132 Org/Bln	26,060,907,431	133 Org/Bln	27,363,952,802	133 Org/Bln	28,732,150,443	661 Org/Bln	129,049,444,787						
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN dibayarkan honorarium	63 orang	63 orang	935,305,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 orang	935,305,000			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	1 Dokumen	1,079,040,000	1 Dokumen	1,375,000,000	1 Dokumen	1,512,500,000	1 Dokumen	1,663,750,000	1 Dokumen	1,830,125,000	25 Dokumen	7,460,415,000						

Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan hasil pengujian / verifikasi keuangan OPD	2 laporan	2 laporan	58,325,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,325,000	Perencanaan dan Keuangan		
			Jumlah dokumen laporan keuangan	2 Dok	2 Dok															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1 Dokumen	170,250,000	1 Dokumen	175,500,000	1 Dokumen	180,250,000	1 Dokumen	185,125,000	1 Dokumen	190,125,000	1 Dokumen		901,250,000	
	4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	51,675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Dokumen	51,675,000
			Jumlah dokumen pelaporan setda	4 Dokumen	4 Dokumen														4 Dokumen	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	2 Dokumen	90,125,000	2 Dokumen	95,250,000	2 Dokumen	97,500,000	2 Dokumen	100,250,000	2 Dokumen	107,724,485	8 Dokumen		490,849,485	
	4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	6,760,008,000	0%	8,739,062,450	12 bulan	8,879,948,480	12 bulan	8,997,943,328	12 bulan	9,897,737,661	12 bulan	10,887,511,427	12 bulan		54,162,211,346	
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah waktu rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	6,760,008,000	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	-	-	12 bulan		6,760,008,000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		-	12 Laporan	8,739,062,450	12 Laporan	8,879,948,480	12 Laporan	8,997,943,328	12 Laporan	9,897,737,661	12 Laporan	10,887,511,427	48 Laporan%		47,402,203,346	
	4.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase BMD terkelola dengan baik	100%	100%	87,425,000	100%	170,250,000	100%	175,125,000	100%	180,500,000	100%	185,750,000	100%	190,500,000	100%		989,550,000	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD OPD yang terkelola	1.137 BMD	1.137 BMD	87,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.137 BMD	87,425,000			
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	1 Laporan	170,250,000	1 Laporan	175,125,000	1 Laporan	180,500,000	1 Laporan	185,750,000	1 Laporan	190,500,000	5 Laporan	902,125,000			
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	100%	100%	16,108,799,058	100%	30,046,744,766	100%	32,811,066,047	100%	35,532,605,792	100%	38,341,544,349	100%	50,566,442,468	100%	203,407,202,480	Bagian Umum		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Setda)	80,66	80,66		80,70		80,80		81,00		85,50		89,00		89,00				
4.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	100%	648,918,800	100%	1,108,826,800	100%	960,152,100	100%	1,056,567,310	100%	1,147,224,041	100%	1,246,946,445	100%	6,168,635,496			
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang tersedia	542 stel	542 stel	346,518,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542 stel	346,518,800			
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	5 Paket	706,031,800	5 Paket	736,485,300	5 Paket	809,033,830	5 Paket	889,937,213	5 Paket	978,930,934	20 Paket	4,120,419,077			
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Staf Ahli	3 Staf Ahli	3 Staf Ahli												3 Staf Ahli				
		Jumlah Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang di Jalankan	2 Aplikasi	2 Aplikasi	252,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Aplikasi	252,400,000			
		Jumlah Waktu Fasilitasi Makanan dan Minuman Staf Ahli	12 Bulan	12 Bulan												12 Bulan				
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	3 Dokumen	330,795,000	3 Dokumen	88,666,800	3 Dokumen	97,533,480	3 Dokumen	107,286,828	3 Dokumen	118,015,511	12 Dokumen	742,297,619			
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan/Pelatihan yang difasilitasi	15 Orang	2 Orang	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Orang	50,000,000			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	2 Orang	72,000,000	27 Orang	135,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	30 Orang	150,000,000	119 Orang	657,000,000			

I.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggungjawab	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	4.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	3,588,712,435	12 Bulan	6,426,533,734	12 Bulan	8,368,575,251	12 Bulan	8,805,432,776	12 Bulan	9,285,976,053	12 Bulan	18,814,573,658	60 Bulan	55,289,803,907	Bagian Umum
		4.01.01.2.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	259,856,864											12 Bulan	259,856,864	
				Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12 Bulan												12 Bulan		
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	302,563,865	1 Paket	932,640,504	1 Paket	1,025,904,554	1 Paket	1,128,495,010	1 Paket	1,241,344,511	4 Paket	4,630,948,444	
		4.01.01.2.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK) yang Tersedia	11 Jenis/Item	11 Jenis/Item	438,890,338							0				11 Jenis/Item	438,890,338	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	2 Paket	497,285,257	2 Paket	947,013,783	2 Paket	1,041,715,161	2 Paket	1,145,886,677	2 Paket	11,260,475,345	8 Paket	14,892,376,223	
		4.01.01.2.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	60 Jenis/Item	60 Jenis/Item	895,727,658											60 Jenis/Item	895,727,658	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	3 Paket	1,116,773,108	3 Paket	1,395,021,520	3 Paket	1,434,523,672	3 Paket	1,477,976,039	3 Paket	525,773,643	12 Paket	5,950,067,982	
		4.01.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik (alat dan bahan pembersih/kebersihan)kantor	12 Bulan	12 Bulan	1,948,228,220											12 Bulan	1,948,228,220	
				Jumlah Waktu Ketersediaan Makanan dan Minuman Kantor	12 Bulan	12 Bulan												12 Bulan		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	4,454,200,169	1 Paket	3,831,708,675	1 Paket	3,914,879,543	1 Paket	4,006,367,497	1 Paket	4,107,004,246	4 Paket	20,314,160,130	
		4.01.01.2.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak (Blangko, Formulir, Buku, Map) dan Penggandaan yang tersedia	7 Jenis/Item	7 Jenis/Item	46,009,355											7 Jenis/Item	46,009,355	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	55,711,335	2 Paket	239,132,469	2 Paket	263,045,716	2 Paket	289,350,287	2 Paket	318,285,316	10 Paket	1,165,525,123	
		4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						2 Laporan	1,023,058,300	2 Laporan	1,125,364,130	2 Laporan	1,237,900,543	2 Laporan	1,361,690,597	6 Laporan	4,748,013,570	
		4.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	100%	100%	1,169,530,100	100%	12,683,112,913	100%	6,176,581,010	100%	6,793,639,111	100%	7,413,663,022	100%	8,221,029,324	100%	42,457,555,480	
		4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan yang Tersedia																
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	12 Unit	1,560,000,000	12 Unit	4,716,000,000	14 Unit	5,187,000,000	12 Unit	5,706,360,000	10 Unit	6,276,996,000	49 Unit	23,446,356,000			
		4.01.01.2.07.02	Pengadaan Mebel	- Jumlah Waktu Pengadaan Mebel yang tersedia																
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket	411,103,200	2 Paket	452,213,520	2 Paket	497,434,872	2 Paket	547,178,359	8 Paket	1,907,929,951					
		4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin yang tersedia	35 Jenis/Item	35 Jenis/Item	1,169,530,100											35 Jenis/Item	1,169,530,100	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	45 Unit	11,123,112,913	50 Unit	1,049,477,810	53 Unit	1,154,425,591	55 Unit	1,209,868,150	63 Unit	1,396,854,965	266 Unit	15,933,739,429			

Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	'4.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	4,668,505,523	100%	3,381,260,675	100%	5,146,416,500	100%	5,741,045,500	100%	6,285,150,050	100%	6,883,665,056	100%	32,106,043,304	Bagian Umum	
	'4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Pendistribusian dan Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Setda	12 bulan	12 bulan	463,425,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	463,425,000		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	-	2 Laporan	463,825,000	2 Laporan	610,207,500	2 Laporan	671,228,250	2 Laporan	738,351,075	2 Laporan	812,186,183	8 Laporan	3,295,798,008			
	'4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Beban Pemakaian Tagihan Telepon, Air, Listrik dan Internet/TV Berlangganan	12 bulan	12 bulan	1,840,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	12 bulan		1,840,500,000
			Jumlah Waktu Penyediaan Beban Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan	1 Tahun	1 Tahun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tahun	-	1 Tahun		
			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	12 bulan		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	-	3 Laporan	1,947,500,000	3 Laporan	1,999,800,000	3 Laporan	2,199,780,000	3 Laporan	2,419,758,000	3 Laporan	2,661,733,800	12 Laporan	11,228,571,800			
	'4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	1,727,115,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-		1,727,115,000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	1 Laporan	336,725,000	1 Laporan	620,409,000	1 Laporan	762,437,250	1 Laporan	808,680,975	1 Laporan	859,549,073	8 Laporan	3,387,801,298			
	'4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	45 Jenis/Item	45 Jenis/Item	637,465,523	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 Jenis/Item	-		637,465,523
			Jumlah Waktu Tersedianya Jasa Pelayanan Umum (Tenaga Kebersihan) Kantor	12 Bulan	12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Bulan	-		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-		1 Laporan	633,210,675	1 Laporan	1,916,000,000	1 Laporan	2,107,600,000	1 Laporan	2,318,360,000	1 Laporan	2,550,196,000	4 Laporan	9,525,366,675		
	'4.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	4,970,924,300	100%	5,379,358,750	100%	7,388,385,900	100%	8,127,224,490	100%	8,939,946,939	100%	9,833,941,634	100%	44,639,782,013		
	'4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	88 Unit	88 Unit	2,624,169,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2,624,169,000
			Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan (Tenaga Supir) Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-		88 Unit	2,812,849,000	125 Unit	3,488,885,900	145 Unit	3,837,774,490	160 Unit	4,221,551,939	172 Unit	4,643,707,133	172 Unit	19,004,768,462		
'4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	- Jumlah Waktu Pemeliharaan Mebel	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	-	313 Unit	70,180,000	325 Unit	77,198,000	330 Unit	84,917,800	335 Unit	93,409,580	335 Unit	325,705,380					
'4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	12 bulan	12 bulan	691,401,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 bulan	-	691,401,800		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	518 Unit	820,165,000	600 Unit	965,881,500	625 Unit	1,062,469,650	628 Unit	1,168,716,615	632 Unit	1,285,588,277	632 Unit	5,302,821,042				

1. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggungjawab	Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan serta pelayanan publik pada Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Gedung	1 Gedung	1,655,353,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	1,655,353,500	Bagian Umum		
				Jumlah Rumah Dinas/Jabatan yang dipelihara/Rehabilitasi	3 Bangunan	3 Bangunan		-	-	-	-	-	3 Bangunan							
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	-		15 Unit	1,746,344,750	15 Unit	2,863,438,500	15 Unit	3,149,782,350	15 Unit	3,464,760,585	15 Unit			3,811,236,644	75 Unit
		4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	Persentase gaji dan Operasional KDH/WKDH yang dibayarkan	100%	100%	1,062,207,900	100%	1,067,651,894	100%	1,790,233,890	100%	1,879,903,069	100%	1,967,911,455	100%	2,054,446,583		100%	9,822,354,791
		4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	Jumlah KDH/WKDH yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	2 orang	2 orang	1,062,207,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 orang	1,062,207,900
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	-	2 orang	1,067,651,894	2 orang	1,171,084,210	2 orang	1,229,638,421	2 orang	1,291,120,342	2 orang	1,355,676,359	8 orang		6,115,171,226	
		4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Jumlah orang yang difasilitasi untuk pakaian Dinas	2 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	6 Paket	81,149,680	6 Paket	85,264,648	6 Paket	94,791,113	6 Paket	99,770,224	18 Paket	360,975,665				
		4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	2 Orang	110,000,000	2 Orang	125,000,000	2 Orang	130,000,000	2 Orang	135,000,000	6Orang		500,000,000	
		4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah	-Jumlah Waktu Penyediaan Dana Operasional KDH/WKDH	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
				Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	-	2 Orang /Bulan	428,000,000	2 Orang /Bulan	440,000,000	2 Orang /Bulan	452,000,000	2 Orang /Bulan	464,000,000	6 Orang /Bulan	1,784,000,000				
		04.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang Tersedia	-	-	100%	2,980,721,396	100%	3,128,793,536	100%	3,301,672,789	100%	3,511,839,768	100%	12,923,027,489				
		04.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-			-	3 Paket	1,744,110,000	3 Paket	1,768,521,000	3 Paket	1,805,373,000	3 Paket	1,865,910,000	9 Paket	7,183,914,000						
04.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	3 Paket	779,751,889	3 Paket	857,727,078	3 Paket	943,499,786	3 Paket	1,037,849,764	9 Paket	3,618,828,517						
04.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	- Jumlah Waktu Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	-	-	3 Paket	456,859,507	3 Paket	502,545,458	3 Paket	552,800,003	3 Paket	608,080,004	9 Paket	2,120,284,972						
4.01.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase OPD Kabupaten tepat ukuran, tepat fungsi	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	8,310,028,973	Bagian Organisasi			
		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	29	-	29	32	35	40	43											
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.66	80%	403,997,473	80.66	1,190,000,000	80.7	1,309,000,000	80.75	1,439,900,000	85	1,583,890,000	88.31	2,383,241,500			88.31		
		Nilai AKIP Kabupaten	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%					
		Nilai AKIP Kabupaten	>60,01	-	>60,01	>61,50	>62,50	>70,01	>70,50											



1. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggungjawab	Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah OPD yang Right Sizing	3 OPD	3 OPD	112,871,156											3 OPD	112,871,156	Bagian Organisasi						
				Jumlah Peraturan Bupati terkait kelembagaan	3 Perbup	3 Perbup																	3 Perbup			
				Jumlah Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen		
				Jumlah Tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen		
				Jumlah regulasi kelembagaan	3 regulasi	-																				
				Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	1 Dokumen	-																				
				Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	1 Dokumen	-																				
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen				3 Dokumen	375,000,000	3 Dokumen	412,500,000	3 Dokumen	453,750,000	3 Dokumen	499,125,000	3 Dokumen	749,037,500			15 Dokumen	2,489,412,500				
				4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Survey Kepuasan Masyarakat		100%	100%	124,995,606															100%	124,995,606
						Jumlah Tersusunnya Laporan SOP		25 SOP	25 SOP																	
	Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	2 Regulasi	2 Regulasi																		2 Regulasi					
	Data Pengaduan Pelayanan Publik Terpadu	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen					
	Data Inovasi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen																		1 Dokumen					
	Jumlah dokumen SOP	1 Dokumen	-																							
	Jumlah Laporan Inovasi Pelayanan Publik	1 Laporan	-																							
	Jumlah OPD yg dilakukan survey IKM	44 OPD	-																							
	Jumlah regulasi kebijakan ketatalaksanaan	1 Regulasi	-																							
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan				4 Laporan	465,000,000	4 Laporan		511,500,000	4 Laporan	562,650,000	4 Laporan	618,915,000	4 Laporan	880,806,500	20 Laporan	3,038,871,500							
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	166,130,711														1 Laporan						
			Jumlah Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi kabupaten	1 Laporan	1 Laporan															1 Laporan						
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Dokumen				2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	385,000,000	2 Dokumen	423,500,000	2 Dokumen	465,850,000	2 Dokumen	753,397,500	10 Dokumen	2,377,747,500								
Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolanan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	100%	100%	1,799,238,669	100%	2,965,901,736	100%	3,629,171,760	100%	3,925,006,112	100%	4,281,319,334	100%	4,737,583,201	100%	21,338,220,812	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan							
			4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolanan	Frekuensi kegiatan pimpinan daerah yang dilakukan secara keprotokolanan	12 Bulan	12 Bulan	177,019,800												12 Bulan						
					Jumlah dokumen kegiatan keprotokolanan	1 Dokumen	1 Dokumen															1 Dokumen				
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan	-			1 Laporan	425,959,800	1 Laporan	526,871,760	1 Laporan	632,246,112	1 Laporan	758,695,334	1 Laporan	910,434,401	5 Laporan	3,254,207,407									

1.Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel serta bertanggungjawab	Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi pelaksanaan peliputan kegiatan pimpinan daerah	12 Bulan	12 Bulan	395,488,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395,488,000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
				Jumlah media jurnal/surat kabar yang dilakukan kerjasama peliputan kegiatan pimpinan daerah	90 media	90 media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
				Frekuensi pengelolaan dokumen laporan kegiatan pimpinan	12 Buah	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
				Jumlah bahan bacaan pimpinan Sekretariat Daerah	36000 Exp	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-		-	1 Laporan	564,975,000	1 Laporan	702,300,000	1 Laporan	842,760,000	1 Laporan	1,011,312,000	1 Laporan	1,213,574,400		4 Laporan	4,334,921,400	-	
		4.01.01.2.14.03	Pendokumentasi Tugas Pimpinan	Frekuensi jasa penayangan dokumentasi cetak dan digital kegiatan pimpinan	12 Bulan	12 Bulan	1,226,730,869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	12 Bulan	1,226,730,869	
				Frekuensi sewa billboard area bandara	16 Kali	16 Kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	16 Kali		
				Frekuensi pengelolaan data dokumentasi kegiatan pimpinan	12 Bulan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-
				Jumlah dokumen kegiatan pendokumentasian	1 Dokumen	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-
				Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-		-	1 Laporan	1,974,966,936	1 Laporan	2,400,000,000	1 Laporan	2,450,000,000	1 Laporan	2,511,312,000	1 Laporan	2,613,574,400		4 Laporan	11,949,853,336		-
2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja penda	Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase keterisian data IKK LPPD	100%	100%	10,957,607,020	100%	16,172,761,765	100%	17,653,900,000	100%	19,659,800,000	100%	22,165,190,000	100%	23,356,296,000	100%	109,965,554,785	Bagian Tapem			
		4.01.02.2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Skorr LPPD	3<ST<4	3<ST<4	708,161,695	3<ST<4	1,395,000,000	3<ST<4	1,571,900,000	3<ST<4	1,711,200,000	3<ST<4	1,806,400,000	3<ST<4	1,846,200,000	3<ST<4	9,038,861,695				
		4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Laporan	1 Laporan	296,879,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Laporan		
				Jumlah Laporan Standar Pelayanan Minimal	1 Laporan	1 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Laporan		
				Jumlah Pelaksanaan Event dalam rangka peningkatan nilai kebangsaan	2 Event (HUT RI & Hari Jadi	2 Event (HUT RI & Hari Jadi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2 Event (HUT RI & Hari Jadi	
				Cakupan wilayah monitoring kesiapan tahapan Pemilu, Pilkada dan Pilpres	13 Kecamatan	13 Kecamatan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	13 Kecamatan	
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-		-	4 Dokumen	550,000,000	4 Dokumen	575,900,000	5 Dokumen	620,000,000	4 Dokumen	685,900,000	4 Dokumen	695,000,000	17 Dokumen		3,126,800,000	-	
		4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Pembuatan nama Rupabumi	1 Laporan	1 Laporan	201,711,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Laporan		
				Jumlah Tanda Batas Kabupaten	4 Tanda	4 Tanda		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 Tanda		
				Jumlah tanda batas Kecamatan	8 Tanda	8 Tanda		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	8 Tanda	
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	-	-		-	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	525,500,000	1 Dokumen	580,500,000	1 Dokumen	590,000,000	1 Dokumen	610,500,000	4 Dokumen		2,726,500,000		
		4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah kecamatan yang dilakukan penilaian camat teladan	13 Kecamatan	13 Kecamatan	209,570,415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 Kecamatan		
				Jumlah Rapat Koordinasi camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Kali Rakor	1 Kali Rakor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1 Kali Rakor	
				Jumlah laporan pengawasan pelaksanaan PATEN	1 Laporan	1 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1 Laporan	
				Jumlah monitoring pelaksanaan perencanaan, penganggaran perbendaharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yg baik tingkat kelurahan	2 Laporan	2 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2 Laporan	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	-			-	-	3 Dokumen		425,000,000	3 Dokumen	470,500,000	3 Dokumen	510,700,000	3 Dokumen	530,500,000	3 Dokumen	540,700,000	12 Dokumen	2,477,400,000					

2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja penda	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	'4.01.02.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	100%	8,752,054,088	100%	12,560,000,000	100%	13,816,000,000	100%	15,447,600,000	100%	17,722,790,000	100%	18,739,096,000	100%	87,037,540,088	Bagian KESRA	
				Capaian Prestasi MIQ tingkat Provinsi	3 Besar	3 Besar		3 Besar		3 Besar		3 Besar		3 Besar		3 Besar		3 Besar			3 Besar
		'4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Cabang Lomba Musyabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kabupaten dilaksanakan	26 Cabang Lomba	0	7,996,638,340												26 Cabang Lomba	7,996,638,340	
			Jumlah Pengujian ASN dan Masyarakat	0	0																48 Kali
			Jumlah cabang lomba musyabaqah tilawatil qur'an (MTQ) tingkat provinsi yang diikuti	26 Cabang Lomba	26 Cabang Lomba																156 Cabang Lomba
			Jumlah pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Syiar Nilai-Nilai Keagamaan	9 Kali Peringatan Hari Besar	9 Kali Peringatan Hari Besar																39 Kali Peringatan Hari Besar
			Jumlah pembinaan pengembangan tilawatil Qur'an yang dilaksanakan	3 Kali Pembinaan	3 Kali Pembinaan																18 Kali Pembinaan
			Jumlah Tahapan Pelaksanaan Training Centre (TC) MTQ	5 Kali Tahapan	5 Kali Tahapan																30 Kali Tahapan
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8 Dokumen				8 Dokumen	8,470,000,000	8 Dokumen	9,317,000,000	8 Dokumen	10,248,700,000	8 Dokumen	11,273,570,000	8 Dokumen	12,400,927,000	32 Dokumen	51,710,197,000		
			Jumlah lembaga yang difasilitasi, diverifikasi, dan dimonitoring, dievaluasi serta diberi rekomendasi terkait permohonan hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat sosial	2 Lembaga / Badan	2 Lembaga / Badan	724,273,300													2 Lembaga / Badan		
			Jumlah pembinaan Da'i Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	134 Da'i Desa/Kel	134 Da'i Desa/Kel															134 Da'i Desa/Kel	
			Jumlah guru minggu yang diberikan intensif pembinaan	200 Orang	200 Orang															200 Orang	
			Jumlah guru agama, imam, mudim dan guru ngaji, khatib dan bilal yang diberi pembinaan	3545 Orang	3545 Orang															3545 Orang	
			Jumlah pelaksanaan festival anak sholeh tingkat kabupaten dan tingkat provinsi	2 Kali	2 Kali															2 Kali	
			Jumlah fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji dan pengiriman TKHD	2 kali fasilitasi	2 kali fasilitasi															2 kali fasilitasi	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-		9 Dokumen	3,560,000,000	9 Dokumen	3,916,000,000	9 Dokumen	4,307,600,000	9 Dokumen	4,738,360,000	9 Dokumen	5,212,196,000	36 Dokumen	21,734,156,000			

2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemda	Meningkatnya pengalaman nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi serta pertemuan forum tim pembina UKS tingkat kabupaten	2 Kali Rapat	2 Kali Rapat	31,142,448											2 Kali Rapat	736,572,448	Bagian KES RA				
				Jumlah penyelesaian proses pencatatan pernikahan bagi masyarakat	653 pasang	653 pasang												653 pasang			653 pasang			
				Jumlah pelaksanaan kegiatan amaliyah ramadhan dua hari raya di 13 kecamatan	5 Kali	5 Kali												5 Kali			5 Kali			
				Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	-												4 Dokumen			530,000,000	4 Dokumen	583,000,000	4 Dokumen
		4.01.02.2.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	-	25 Keluarga	125,000,000	25 Keluarga	150,000,000	25 Keluarga	175,000,000	75 Keluarga	450,000,000							
4.01.02.2.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	-	-	25 Keluarga	125,000,000	25 Keluarga	150,000,000	25 Keluarga	175,000,000	75 Keluarga	450,000,000									
Meningkatnya penataan produk hukum daerah		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang dindangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	100%	100%	926,797,269	100%	1,406,000,000	100%	1,381,000,000	100%	1,556,000,000	100%	1,631,000,000	100%	1,706,000,000	100%	8,606,797,269	Bagian Hukum				
		4.01.02.2.03.01	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang diundangkan	10 Perda	12 Perda	488,814,271															12 Perda	488,814,271	
				Jumlah Perbup yang diundangkan	30 Perbup	50 Perbup																50 Perbup		
				Jumlah SK yang diterbitkan	1000 SK	1000 SK																1000 SK		
				Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4 Dokumen																	4 Dokumen		526,000,000
		4.01.02.2.03.02	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	3 Perkara	3 Perkara	162,838,000																3 Perkara	162,838,000
				Jumlah Laporan Aksi HAM	4 Lap.Aksi HAM	4 Lap.Aksi HAM																	4 Lap.Aksi HAM	
				Jumlah Laporan Kadarkum	-	1 Laporan Kadarkum																	1 Laporan Kadarkum	
				Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-																	2 Kasus	
		4.01.02.2.03.03	Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Koordinasi dan konsultasi penetapan raperda (Harmonisasi)	-	4 Kali	275,144,998																4 Kali	275,144,998
Jumlah Laporan SIDH	1 Laporan SIDH			1 Laporan SIDH	1 Laporan SIDH																			
Jumlah perda dan himpunan perda Desa/Kel. Yang mendapatkan penyuluhan hukum	600 Buku Perda 12 Desa/Kel			600 Buku Perda 12 Desa/Kel	600 Buku Perda 12 Desa/Kel																			
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-			-	5 Dokumen	430,000,000														5 Dokumen			455,000,000	

2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pmda	Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	'4.01.02.2.04	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang terfasilitasi	100%	100%	570,593,968	100%	811,761,765	100%	885,000,000	100%	945,000,000	100%	1,005,000,000	100%	1,065,000,000	100%	5,282,355,733	Bagian Kerjasama			
		4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan dalam negeri yang difasilitasi	67 Dok	67 Dok	317,892,065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 Dok		317,892,065		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	-	-	-	3 Dokumen	347,892,065	3 Dokumen	380,000,000	3 Dokumen	400,000,000	3 Dokumen	420,000,000	3 Dokumen	440,000,000	12 Dokumen	1,987,892,065				
				Jumlah dokumen Kerjasama lembaga / perorangan luar negeri yang difasilitasi	3 Dok	3 Dok	146,232,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Dok		146,232,203		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-	-	-	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	320,000,000	2 Dokumen	340,000,000	2 Dokumen	360,000,000	2 Dokumen	380,000,000	10 Dokumen	1,700,000,000					
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Monitoring dan evaluasi kerjasama yang difasilitasi	70 Dok	70 Dok	106,469,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 Dok	106,469,700			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-	-	-	5 Laporan	163,869,700	5 Laporan	185,000,000	5 Laporan	205,000,000	5 Laporan	225,000,000	5 Laporan	245,000,000	25 Laporan	1,023,869,700					
	Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	'4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	100%	100%	8,810,849,686	100%	41,000,350,298	100%	43,110,870,000	100%	36,839,900,000	100%	22,656,390,288	100%	22,767,279,000	100%	175,185,639,272	Bagian Perekonomian			
			'4.01.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakan	100%	100%	7,277,477,298	100%	39,000,000,000	100%	39,175,000,000	100%	34,400,000,000	100%	19,550,000,000	100%	19,700,000,000	100%		159,102,477,298		
		4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang diberikan penyertaan modal (PT.BPR Tango Rajo, PT Tanjung Sakti, BPD)	3 BUMD	3 BUMD	7,138,436,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 BUMD	7,138,436,500		
				Jumlah BUMD yang diberikan Subsidi ( PDAM Tirta Pengabuan)	-	1 BUMD		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 BUMD	
				Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD)	1 Laporan	1 laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	1 laporan
				Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BUMD dan BLUD	4 kali	4 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	4 kali
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	-	2 Dokumen	38,700,000,000	2 Dokumen	35,725,000,000	2 Dokumen	30,700,000,000	2 Dokumen	15,700,000,000	2 Dokumen	15,700,000,000	10 Dokumen	136,525,000,000					
4.01.03.2.01.02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah monitoring dan evaluasi Pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	4 kali	4 kali	67,357,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kali	67,357,848			
			Jumlah laporan sembako	12 Laporan	12 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 Laporan		
			Jumlah laporan TPID	5 Laporan	5 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 Laporan		
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	-	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	1,225,000,000	2 Laporan	1,300,000,000	2 Laporan	1,350,000,000	2 Laporan	1,400,000,000	10 Laporan	5,425,000,000							
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah laporan KUPEM	12 Laporan	12 laporan	71,682,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	71,682,950			
		Jumlah laporan Pupuk	4 Laporan	4 laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Laporan				
		Jumlah monitoring dan pembinaan KUPEM	4 Kali	4 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kali				
		Jumlah monitoring penyaluran pupuk dan pestisida tepat sasaran	4 Kali	4 kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Kali				
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	-	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	1,225,000,000	2 Dokumen	1,300,000,000	2 Dokumen	1,350,000,000	2 Dokumen	1,400,000,000	10 Dokumen	5,425,000,000							
4.1.3.201.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	575,000,000	1 Dokumen	600,000,000	4 Dokumen	2,225,000,000						
4.1.3.201.5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	575,000,000	1 Dokumen	600,000,000	4 Dokumen	2,225,000,000						

2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemda	Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	'4.01.03.2.02	Kegiatan Administrasi Pembangunan	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	100%	100%	305,663,400	100%	575,000,000	100%	632,500,000	100%	695,750,000	100%	765,325,000	100%	841,857,500	100%	3,816,095,900	Bagian ADP		
		'4.01.03.2.01	Fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jumlah dokumen data pembangunan Kab. Tanjab Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	124,350,000	1 Dokumen											1 Dokumen		124,350,000	
				Frekuensi rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan di Kab. Tanjab Barat	12 bulan	12 bulan		12 bulan														12 bulan
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	-	-	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	275,000,000	1 Dokumen	302,500,000	1 Dokumen	332,750,000	1 Dokumen	366,025,000	5 Dokumen	1,526,275,000			
		'4.01.03.2.02	Pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pelaporan hasil monitoring	4 kali	4 kali	36,313,400														4 kali	36,313,400
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	-	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	181,500,000	1 Laporan	199,650,000	1 Laporan	219,615,000	5 Laporan	915,765,000			
		'4.01.03.2.03	Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah LPPK dan Rekap Program OPD	12 Laporan	12 Laporan	145,000,000														12 Laporan	145,000,000
				Jumlah pelaporan laporan tetra sismontetra	12 Laporan	12 Laporan															12 Laporan	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	-	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	192,500,000	1 Laporan	211,750,000	1 Laporan	232,925,000	1 Laporan	256,217,500	5 Laporan	1,068,392,500			
		'4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas	100%	100%	788,950,288	100%	810,350,298	100%	2,626,870,000	100%	1,000,000,000	100%	1,522,500,288	100%	1,325,000,000	100%	8,073,670,874		Bagian PBJ	
'4.01.03.2.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	100%	150 Paket	191,450,000													150 Paket	191,450,000			
		Jumlah paket lelang yang dilaksanakan tepat waktu dan tuntas	100%	150 Paket														150 Paket				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	150 Dokumen	202,450,000	150 Dokumen	1,675,070,000	165 Dokumen	500,000,000	150 Dokumen	525,000,000	155 Dokumen	625,000,000	620 Dokumen	3,527,520,000					
'4.01.03.2.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang menyampaikan RUP tepat Waktu	44 OPD	44 OPD	345,700,000														345,700,000			
		Jumlah pemeliharaan Co. Location	1 Lokasi	1 Lokasi																		
		Jumlah server yang dilakukan pengecekan dan servis berkala	2 Server	2 Server																		
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	-	44 Dokumen	363,400,000	44 Dokumen	600,000,000	44 Dokumen	300,000,000	44 Dokumen	545,700,000	44 Dokumen	400,000,000	176 Dokumen	2,209,100,000					
'4.01.03.2.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta sosialisasi	-	84 Peserta	251,800,288													84 Peserta	251,800,288			
		Jumlah peserta ujian sertifikasi PPBJ tingkat dasar	-	84 Peserta														84 Peserta				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	80 Orang	244,500,298	80 Orang	351,800,000	80 Orang	200,000,000	80 Orang	451,800,288	80 Orang	300,000,000	320 Orang	1,548,100,586					

2.Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat yang beragama,berbudaya,dan tertib hukum serta pembinaan/pengawasan kinerja pemma	Meningkatnya koordinasi dan pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	4.01.03.2.04	Kegiatan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	100%	80%	438,758,700	80%	615,000,000	80%	676,500,000	80%	744,150,000	80%	818,565,000	80%	900,421,500	80%	4,193,395,200	Bgaian ASDA		
		4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Snkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Koordinasi,Snkronisasi, Fasiilitasi dan monitoring bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan,Kehutanan, dan Kelautan dan Perikanan	99%	13 kali	85,739,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 kali		85,739,600	
				Jumlah Dokumen Laporan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 Dokumen	-
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Snkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	346,500,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	419,265,000	1 Dokumen	219,615,000	4 Dokumen	1,316,880,000			
		4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Snkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Hidup	Jumlah Koordinasi,Snkronisasi, Fasiilitasi dan Monitoring bidang Pertambangan dan lingkungan hidup	100%	5 kali	285,416,600	-	-	-	-	-	-	-	-	5 kali	-	-	5 kali		285,416,600	
				Jumlah Laporan evaluasi	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	-	-	1 Laporan		-	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Snkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	-	-	-	1 Dokumen	315,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	461,191,500	4 Dokumen	1,322,341,500			
		4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Snkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Koordinasi,Snkronisasi, Fasiilitasi dan Monitoring bidang Energi dan Air	100%	5 kali	67,602,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 kali		67,602,500	
				Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Dokumen	-
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Snkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	381,150,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	4 Dokumen	1,115,415,000			
<b>JUMLAH TOTAL:</b>							<b>62,766,863,606</b>		<b>124,215,493,287</b>		<b>134,701,219,126</b>		<b>135,130,412,413</b>		<b>129,151,588,897</b>		<b>146,485,047,987</b>		<b>732,450,625,316</b>			

## BAB VII

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat daerah akan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKPJ tahunan dan LKPJ lima tahunan akhir akhir masa jabatan Kepala Daerah. Indikator Kinerja Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disertai dengan target kinerja dalam kurun 5 (lima) tahun 2021-2026 dapat lihat pada Tabel XI dan Tabel **T.C.28** dibawah.



No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KET	
1.	1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, laporan dan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan pelaporan keuangan yang diverifikasi dibagi Jumlah dokumen perencanaan pelaporan yang disampaikan dikali seratus persen	BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN		
		Cakupan pelayanan administrasi Surat Menyurat OPD dan Masyarakat	Jumlah pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan masyarakat yang masuk dibagi jumlah pelayanan administrasi surat menyurat OPD dan masyarakat yang diproses dikali seratus persen	BAGIAN UMUM		
		Cakupan pelayanan sarana prasarana kantor Setda, KDH dan WKDH	jumlah kebutuhan sarana prasarana kantor setda KDH/WKDH dibagi jumlah sarana prasarana yang ada dikali seratus persen	BAGIAN UMUM		
	1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik akuntabilitas kinerja dan kelembagaan yang efektif	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Total nilai perangkat daerah dibagi jumlah perangkat daerah	BAGIAN ORGANISASI		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai presepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang			
		Nilai AKIP Kabupaten	Hasil evaluasi Kemen PAN & RB			
	1.3. Meningkatkan pelayanan Kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah	Persentase Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berjalan lancar dan terdokumentasi	Jumlah Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dibagi Jumlah Produk hukum yang ada dikali seratus persen	BAGIAN PROTOKOLER		
	2.	2.1. Meningkatnya Kemampuan dan Kemandirian Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah	Persentase keterisian data IKK LPPD	Jumlah IKK LPPD yang harus isi oleh OPD dibagi Jumlah OPD yang mengisi IKK LPPD dikali seartus persen	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
			Skor LPPD	Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri		
2.2. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kesejahteraan rakyat		Persentase kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	Jumlah kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan bidang urusan kesejahteraan rakyat yang ada dikali seratus persen	BAGIAN KESRA		

2.3. Meningkatnya penataan produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya	Jumlah Hukum Daerah yang Di undangkan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dibagi Jumlah Produk hukum yang ada dikali seratus persen	BAGIAN HUKUM	
2.4. Meningkatnya Kerja Sama antar Daerah / Lembaga / Perseorangan Dalam Negeri & Luar Negeri	Persentase kerja sama antar daerah, lembaga/perorangan yang Terfasilitasi	Jumlah kerjasama antar daerah yang terfasilitasi dibagi jumlah kerjasama daerah lembaga yang diterbitkan di kali seratus persen	BAGIAN KERJASAMA	
2.5. Meningkatnya administrasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah	Persentase Kebijakan bidang ekonomi yang di laksanakan	Jumlah kebijakan bidang ekenomi yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan ekonomi yang ada dikali seratus persen	BAGIAN PEREKONOMIAN	
2.6. Meningkatnya Akses Informasi Pembangunan Daerah	Persentase evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah	Jumlah evaluasi dan pengendalian program pembangunan daerah dibagi dan pengendalian program pembangunan daerah yang dilaksanakan dibagi seratus persen	BAGIAN ADP	
	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tuntas dan tepat waktu	Jumlah paket pengadaan barang & jasa yang dilaksanakan dibagi jumlah pengadaan barang & jasa ditayangkan dan dilaksanakan dgn tuntas dan tepat waktu dikali seratus persen	BAGIAN PENGADAAN BARANG & JASA	
2.7. Meningkatnya koordinasi dan Pengendalian Sumber Daya Alam yang kondusif	Persentase koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif	Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang terlaksana dengan efektif dibagi Jumlah koordinasi dan fasilitasi bidang urusan sumber daya alam yang ada dikali seratus persen	BAGIAN SDA	

## BAB VIII

# P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pembangunan Jangka Menengah akan mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh lapisan masyarakat apabila pembangunan tersebut konsisten mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Oleh karenanya seluruh program pembangunan jangka menengah dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran, keterpaduan, sinkronisasi, integrasi dan sinergi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah pembangunan. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan prinsip-prinsip tata pengelolaan pemerintahan yang baik antara lain: prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dalam Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Jika dalam penyusunan Revisi Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Kuala Tungkal, Juni 2022

